

**ANALISIS EKONOMI BASIS SEKTOR PERTANIAN
DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI



Oleh :

AGUS TURSILO WISANTO

H0301039

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2007

**ANALISIS EKONOMI BASIS SEKTOR PERTANIAN
DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN
SUKOHARJO**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian
di Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret**

Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis



Oleh

Agus Tursilo Wisanto

H0301039

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

**ANALISIS EKONOMI BASIS SEKTOR PERTANIAN
DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN SUKOHARJO**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Agus Tursilo Wisanto

H0301039

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal : 27 November 2007

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Anggota I

Anggota II

Ir. Ropingi, M.Si.
NIP. 131 943 615

Wiwit Rahayu, S.P., M.P.
NIP. 132 173 134

Ir. Agustono, M.Si.
NIP. 131 884 419

Surakarta, November 2007

Mengetahui

Universitas Sebelas Maret

Fakultas Pertanian

Dekan

Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, M.S.
NIP. 131 124 609

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Subkhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo”

Pada kesempatan ini penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penyusun tujukan terutama kepada :

1. Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Ir. Catur Tunggal BJP., M.S. selaku Ketua Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Ir. Ropingi, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik dan dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Wiwit Rahayu, S.P., M.P. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bupati Sukoharjo, Kepala BAPEDA Kabupaten Sukoharjo dan Kepala BPS Kabupaten Sukoharjo beserta staff atas semua data dan informasinya.
7. Bapak Hadi Busono, Ibu Parningsih, Mbak Sulis yang membiayai kuliahku, mbak Anik dan Mas Slamet yang selalu membantu, Mbak Heni dan Istri tercintaku Siti Zubaidah “Az-Zahra” atas cinta, kasih sayang, inspirasi, semangat, doa, nasehat dan dukungannya selama ini.
8. Bapak Danuri, S.Ag selaku Kepala MIN Sukoharjo yang senantiasa memberikan support untuk menyelesaikan kuliah kepada penulis
9. Segenap keluarga besar di MIN Sukoharjo atas doa, bantuan dan dukungannya.

10. *Special thank's to* : Dik Amin dan Yanwar (atas bantuan dan waktunya), Inung (atas kebaikannya), Alamah dan Arwin (atas petunjuk-petunjuknya), Kriyip, Syarif, Arif, Kholish, Irfani (atas kebersamaannya) dan teman-teman di Agrobisnis '01 atas persahabatan dan kekompakannya selama ini. Persaudaraan kita yang membantu penyusun mampu menyelesaikan kuliah di UNS sampai saat ini, *so keep this ukhuwah*.
11. Bapak Wahyono, SP dan mbak Ira atas segala bantuannya.
12. 'Aisyah buah hatiku yang menjadikan Abi semangat menyelesaikan kuliah.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata penyusun mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, November 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
II. LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Pustaka	10
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah	21
D. Asumsi-asumsi	25
E. Pembatasan Masalah	25
F. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel	25
III. METODE PENELITIAN	28
A. Metode Dasar Penelitian	28
B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Metode Analisis Data	30

	Halaman	
IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	34	DA
A. Keadaan Alam	34	FT
B. Keadaan Penduduk	36	AR
C. Keadaan Perekonomian	40	PU
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44	ST
A. Analisis Location Quotient	44	AK
B. Analisis Dyanamic Location Quotient	52	A
C. Analisis Gabungan Location Quotient dan Dyanamic Location Quotient	59	...
D. Analisis Shift Share	62	...
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	68	...
A. Kesimpulan	69	...
B. Saran	69	...
.....	71	...
LAMPIRAN	74	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 (dalam jutaan rupiah)	4
Tabel 2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karesidenan Surakarta Tahun 2001 – 2005	28
Tabel 3.	Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005	29
Tabel 4.	Tabel 4 Banyaknya Pengiriman Beras Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Ton)	29
Tabel 5.	Rata-rata Banyaknya Curah Hujan dan hari hujan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005	36
Tabel 6.	Keadaan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005	37
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005	38
Tabel 8.	Banyaknya Penduduk (10 tahun keatas) Menurut Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002-2004 ..	39
Tabel 9.	Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Di kabupaten Sukoharjo Tahun 2005	40
Tabel 10.	Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggotanya Di Kabupaten Sukoharjo	41
Tabel 11.	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 – 2004 (Juta Rupiah)	41
Tabel 12.	Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005	45
Tabel 13.	Nilai LQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo	50
Tabel 14.	Nilai DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo.....	53

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 15.	Nilai DLQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo	57
Tabel 16.	Perubahan Posisi Sektor Perekonomian di Kabupaten Sukoharjo	59
Tabel 17.	Perubahan Posisi Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo	60
Tabel 18.	Nilai SSS, LSS dan TSS Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo	62
Tabel 19.	Nilai SSS, LSS dan TSS Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan, Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Sub Sektor Peternakan, Sub Sektor Kehutanan dan Sub Sektor Perikanan Kabupaten Sukoharjo	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1.	Kerangka Penelitian Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo	24

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 Tahun 2001-2005	74
2.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun ADHK 2000 Tahun 2001-2005	74
3.	PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005	74
4.	PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005	74
5.	PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005	75
6.	PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005	75
7.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 (persen)	75
8.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 (persen)	75
9.	Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo	76
10.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 Tahun 2001-2005	76
11.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 Tahun 2001-2005	76
12.	PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005	76
13.	PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005	76
14.	Nilai LQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo	76

Nomor	Judul	Halaman
15.	Nilai DLQ dan SSA Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo	77
16.	Nilai DLQ dan SSA Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo	77
17.	Gabungan Nilai LQ dan DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo	77
18.	Gabungan Nilai LQ dan DLQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo	77
19.	PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004-2005	77
20.	Peta Kabupaten Sukoharjo	78
21.	Surat Permohonan Ijin Penelitian	79
22.	Surat Ijin Penelitian	80

RINGKASAN

Agus Tursilo Wisanto. H0301039. 2001. **Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo**. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi sektor pertanian dalam perekonomian, untuk mengetahui posisi sub sektor pertanian dalam perekonomian, untuk mengetahui perubahan posisi sektor pertanian dalam perekonomian pada masa yang akan datang, untuk mengetahui perubahan posisi sub sektor pertanian dalam perekonomian pada masa yang akan datang, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menggunakan metode analisis data *Location Quotient*, *Dynamic Location Quotient* dan *Shift Share*.

Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2001-2005, Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2001-2005, Kabupaten Sukoharjo dalam Angka 2005 dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2001-2005.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2001-2005 terdapat lima sektor ekonomi yang merupakan sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sedangkan sub sektor pertanian yang merupakan sub sektor basis yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan.

Berdasarkan hasil analisis DLQ diketahui terdapat tiga sektor ekonomi yang dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang. Ketiga sektor ekonomi tersebut adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sedangkan sub sektor pertanian tidak ada yang mampu menjadi sub sektor basis pada masa yang akan datang.

Sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang mengalami perubahan posisi di masa yang akan datang yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan galian. Sub sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo yang mengalami perubahan posisi di masa yang akan datang yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi pada sektor pertanian karena faktor lokasi sedangkan perubahan posisi pada sektor pertambangan dan galian karena faktor strukturnya. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi pada sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan karena strukturnya sedangkan perubahan posisi sub sektor kehutanan karena faktor lokasinya.

SUMMARY

Agus Tursilo Wisanto. H0301039. 2001. **The Base Economic Analysis of Agricultural Sector for Otonomi Daerah in Sukoharjo Regency**. Agriculture Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta.

The purpose of this research are to identify the position of agriculture sector in economic, the position of agriculture sub sector in economic, the position changes of agriculture sector in the future economic, the position changes of agriculture sub sector in the future economic and to know the factors that caused position changes of agriculture sector and agriculture sub sector in Sukoharjo Regency. The research method used is descriptive method, which employs the data analysis method of Location Quotient, Dynamic Location Quotient and Shift Share.

This research takes the Gross Domestic Regional Product (GDRP) of Central Java Province and Sukoharjo Regency for the Basic Price Occur period of 2001-2005, the Implicit Price Index GDRP of Central Java Province and Sukoharjo Regency in 2001-2005, Sukoharjo Regency in Figures 2005 and the Development Program of Sukoharjo Regency in 2001-2005, as the data.

The result of this research shows that during five years (2001-2005), Sukoharjo Regency possesses five economic sectors which become the base sector, there are agriculture sector, mining and exploring sector, electric, gas and clear water sector, trade, hotel and restaurant sector, financial, rent and company service sector and also services sector. While the base sector of agriculture sub sector are plant producing food sub sector, cattle sub sector and forestry sub sector.

According to DLQ analysis, there are three economic sectors and three agriculture sub sectors that may become the base sector in the future. The third of economic sectors are electric, gas and clear water sector, trade, hotel and restaurant sector and financial, rent and company service sector, while for the agriculture sub sectors nothing to be able to become base sub sectore in the future.

The economic sector of Sukoharjo Regency which experience the position changes in the future are agriculture sector and mining and exploring sector. The agriculture sub sector of Sukoharjo Regency which the experience the position changes in the future are plant producing sub sector, cattle sub sector and forestry sub sector. The factor causing position changes in agriculture sector is location factor, while the factor causing position changes mining and exploring sector is economic structure factor. While the factor causing position changes plant producing sub sector and cattle sub sector are economic structure factor, while the factor causing position changes forestry sub sector is location factor.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dimana dalam peningkatan usaha ini diperlukan kerjasama antara semua elemen yang terkait sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Pembangunan merupakan sebuah perubahan yang terencana. Sebagai perubahan yang terencana, maka pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, melalui berbagai proses yang melibatkan seluruh elemen yang terkait didalamnya sejak persiapan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi dan pembiayaan.

Dalam Arsyad (2001) dijelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan upaya daerah untuk menekankan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya manusia yang ada dan potensi alam yang menjadi kekhasan daerah.

Sebetulnya sejak PELITA III, pemerintah Indonesia telah menitikberatkan program melanjutkan pembangunan pada pemerataan dan keseimbangan pembangunan ke daerah, menuju peningkatan masyarakat di daerah terbelakang. Telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya dengan dasar azas pemerataan. Pembangunan lebih diutamakan untuk daerah, bukan lagi terpusat (Triharso,1993).

Adanya pemerataan pembangunan ini sedikitnya berdampak perubahan-perubahan di daerah, baik fisik maupun non fisik. Perubahan fisik tampak nyata dari terbukanya wilayah terisolir, meningkatnya pendapatan regional/ daerah, perluasan kesempatan kerja serta umumnya peningkatan sektor ekonomi. Perubahan fisik ini tak bisa tidak akan membawa serta berbagai perubahan non fisik dalam masyarakat, yang tidak terbatas di tempat kerja saja tapi akan menyentuh seluruh sikap dan perilaku masyarakat. Pada kadar terbatas, partisipasi daerah mulai dirasakan walaupun masih perlu terus menerus dikembangkan (Soedjarwo,1992).

Perilaku yang menunjang pembangunan masih dilematis dirasakan, karena belum sepenuhnya daerah dapat mengatur penyelesaian masalahnya. Pendekatan instruktif masih berlangsung dari pusat birokrasi ke daerah; format de-sentralisasi yang belum terwujud antara lain tercermin dari pengaturan yang masih bersifat atas bawah; aktifitas pembangunan masih berbentuk "paket jadi" dan lain-lain. Perencanaan teknokratis yang dirancang dari atas tanpa disertai proses penumbuhan kemampuan daerah dalam mengembangkan inisiatif sendiri, seringkali justru membawa dampak ketergantungan yang lebih besar terhadap bantuan dari pusat. Daerah terbiasa menunggu uluran tangan dari pusat birokrasi (Baharsyah,1993).

Pada masa transisi setelah datangnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rejim orde baru, berbagai kebijakan telah digariskan. Salah satunya yang fenomenal adalah UU RI No. 32/2004 yang maknanya otonomi daerah seluas-luasnya bertumpu ke daerah tingkat II dan UU RI No 32 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan pusat dan daerah. Implikasi logis dari otonomi ini tentunya memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mampu kreatif, boleh mengembangkan prakarsa-prakarsa positif dan tentunya merdeka dalam memilih pendekatan pembangunan.

Tujuan pokok dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana maksud dari UU RI No 32 Tahun 2004 dan PP nomor 25 tahun 2000 adalah mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui pendayagunaan ke berbagai sumberdaya ekonomi yang tersedia di setiap kawasan/daerah.

Sumberdaya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah dan siap didayagunakan untuk membangun ekonomi daerah adalah sumberdaya agribisnis seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agroklimat), SDM di bidang agribisnis teknologi di bidang agribisnis dan lain-lain. Melihat kenyataan demikian, maka untuk membangun ekonomi daerah pilihan yang paling rasional adalah melalui percepatan pembangunan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis.

Pada tahun 2005 kinerja perekonomian Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan sejalan dengan kondisi perekonomian nasional. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo tumbuh sebesar 4,11 persen. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya nilai nominal PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan serta laju pertumbuhan ekonomi (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2005).

Sektor pertanian mengalami perkembangan yang positif dimana sektor pertanian pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 5,94 persen, menempati posisi kedua setelah sektor bangunan sebesar 7,26 persen. Positifnya perkembangan sektor pertanian ini disebabkan naiknya produksi panen dari beberapa komoditi pertanian, yang tergabung dalam sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, kehutanan (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2005).

Pertumbuhan ekonomi untuk sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 4,69 persen, peternakan 15,31 persen, kehutanan 1,44 persen dan perikanan 15,40 persen. Sedangkan sub sektor perkebunan mengalami penurunan sebesar 8,40 persen (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2005).

Dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah melalui prioritas pembangunan guna mempercepat pembangunan daerah, memperbaiki serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian, maka diperlukan pengembangan dan pembinaan sektor-sektor yang memiliki keunggulan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk keperluan ini diperlukan informasi mengenai potensi, posisi dan perubahan posisi di masa yang akan datang khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu diadakan penggalan informasi yang lebih detail melalui penelitian-penelitian tentang identifikasi sektor pertanian dan sub sektor

B. Perumusan Masalah

Pertanian merupakan salah satu bidang perekonomian yang banyak menyentuh masyarakat terutama masyarakat pedesaan seperti kabupaten Sukoharjo. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dimana sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil

pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan yang dicapai daerah tersebut. Hal ini terbukti bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukoharjo pada sektor pertanian tahun 2001 sebanyak 110.048 dari 432.769 jumlah penduduk yang bekerja atau sekitar 25,42 %.

Pertanian mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2005 sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) sebesar 20,36 % nomor ketiga setelah sektor industri pengolahan sebesar 30,49 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27 %. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Nilai PDRB	Persen
1. Pertanian	802.838,94	20,36
2. Pertambangan dan Penggalian	33.839,31	0,85
3. Industri Pengolahan	1.202.242,45	30,49
4. Listrik, Gas dan Air Minum	37.066,23	0,94
5. Bangunan / Konstruksi	157.679,83	4,00
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.100.398,77	27,91
7. Pengangkutan dan Komunikasi	169.798,34	4,30
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	131.413,31	3,33
9. Jasa-jasa	306.511,30	7,77
PDRB	3.941.788,47	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo 2005

Sektor pertanian mempunyai peran dalam menyediakan input pada sektor industri pengolahan sehingga sektor industri pengolahan akan berkembang. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo relatif besar. Dengan peran sektor pertanian ini, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Sebagai contoh, sektor tanaman bahan makanan menyediakan input berupa sayur-sayuran dan buah-buahan bagi sektor restoran dan bagi sektor perdagangan sektor tanaman bahan makanan menyediakan hasil pertanian yang

dapat langsung dijual, misalnya kacang, jagung, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Kabupaten Sukoharjo dituntut untuk membangun daerahnya dengan berlandaskan pada kemampuan dan kemandirian daerahnya sendiri. Dengan membangun sinergi kerjasama antara Pemerintah Daerah, penduduk setempat dan pihak-pihak yang terkait diharapkan terjalin kerjasama yang kokoh dalam upaya pengembangan potensi daerah terutama di sektor pertanian. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada prinsip peningkatan pendapatan daerah adalah mengidentifikasi sektor yang merupakan sektor basis dan non basis. Dalam hal ini pemerintah daerah berupaya untuk selalu mendorong masing-masing daerah atau desa untuk mengembangkan sector-sector ekonomi yang merupakan sektor basis dan mendorong sektor ekonomi non basis agar menjadi basis

Dengan mengetahui kondisi sektor pertanian yang menjadi basis serta penyebarannya akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan terkait dengan sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah ini diharapkan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian wilayah.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana posisi sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana posisi sub sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo ?
3. Apakah ada perubahan posisi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo pada masa yang akan datang ?
4. Apakah ada perubahan posisi sub sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo pada masa yang akan datang ?

5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di masa yang akan datang ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui posisi sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo
2. Untuk mengetahui posisi sub sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo
3. Untuk mengetahui perubahan posisi sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo pada masa yang akan datang.
4. Untuk mengetahui perubahan posisi sub sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo pada masa yang akan datang
5. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk mengetahui apakah sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo merupakan sektor basis atau tidak dan faktor penyebab perubahannya jika terjadi perubahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengambilan keputusan dalam rangka menghadapi pelaksanaan dan penerapan UU RI No 32 Tahun 2004.
3. Bagi pihak lain, diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi permasalahan yang sama.

II. LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Murni (2005) menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 1999 – 2003 Kabupaten Pematang memiliki empat sektor ekonomi yang menjadi basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sub sektor pertanian yang menjadi basis adalah sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan. Berdasarkan analisis DLQ yang masih dapat diharapkan untuk tetap menjadi basis adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa sedangkan sub sektor pertanian yang diharapkan tetap menjadi basis adalah sub sektor tanaman bahan makanan. Berdasarkan analisis Shift Share diketahui bahwa faktor yang menentukan perubahan posisi sektor perdagangan dari non basis menjadi basis adalah faktor lokasinya, begitu pula faktor yang menyebabkan perubahan sub sektor tanaman bahan makanan dari non basis menjadi basis, sub sektor perkebunan dan kehutanan dari basis menjadi non basis.

Menurut penelitian Sudarwati (2005) bahwa dalam kurun waktu 1999-2003 terdapat tujuh sektor ekonomi yang merupakan sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Purworejo, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa, sedangkan sub sektor pertanian yang merupakan sub sektor basis yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan rakyat dan sub sektor kehutanan. Berdasarkan hasil analisis DLQ diketahui terdapat tujuh sektor ekonomi dan tiga sub sektor pertanian yang dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang. Ketujuh sektor ekonomi tersebut adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa, sedangkan tiga sub sektor pertanian tersebut adalah sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sektor ekonomi Kabupaten Purworejo yang mengalami perubahan posisi di masa yang

akan datang yaitu sektor pertambangan dan galian dengan sektor industri pengolahan. Sub sektor pertanian Kabupaten Purworejo yang mengalami perubahan posisi di masa yang akan datang yaitu sub sektor tanaman perkebunan rakyat, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi pada sektor pertambangan dan galian dengan sub sektor tanaman perkebunan rakyat adalah faktor strukturnya. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi pada sektor industri pengolahan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan adalah faktor lokasinya.

Penelitian Chambali (2004) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1998 – 2002, sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri merupakan sektor basis. Sektor lain yang menjadi basis adalah sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa dan pemerintahan.

Pada tahun 1997 di Kabupaten Boyolali terdapat dua sektor yang diunggulkan yaitu sektor pertanian dan perdagangan . Pada tahun 1998, selain sektor pertanian dan perdagangan ada sektor lain yang dapat diunggulkan yaitu sektor angkutan dan keuangan. Sedangkan sektor jasa mempunyai nilai $LQ = 1$, yang berarti sektor tersebut tidak dapat diekspor karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri (Fatimah dan Haris, 2002).

Menurut Wuryandari (2002) pada kurun waktu tahun 1993-2000 di Propinsi Jawa Tengah terdapat sektor-sektor yang mendukung perekonomian yang meliputi sektor pertanian, sektor jasa-jasa, industri pengolahan, hotel dan restoran, perdagangan. Keempat sektor tersebut merupakan sektor basis dan dapat diekspor ke daerah lain (Wuryandari, 2003).

Hasil Penelitian mengenai Analisis Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian Sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Hastuti (2002), menyimpulkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun 1993 -1997 dan periode 1997 -2000 mempunyai pertumbuhan yang cepat karena adanya pengaruh kebijakan terhadap sektor lainnya yaitu nilai PP yang mengalami perubahan dari Rp - 55.017,851 juta menjadi Rp 22.197,113 juta. Sedangkan Potensi daya saing sektor

pertanian menurun dari Rp 14.290,09 juta menjadi Rp -51.649,443 juta. Sehingga sektor pertanian tidak mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lainnya.

Beberapa penelitian yang dipaparkan diatas diambil sebagai pendahuluan dalam penelitian ini karena penelitian-penelitian tersebut mempunyai kaitannya dengan penelitian ini diantaranya ada penelitian yang dilaksanakan satu karesidenan dengan penelitian ini yaitu penelitian di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri sehingga karakteristik umumnya hampir sama karena berada pada kawasan yang sama pula. Sedangkan penelitian yang lainnya digunakan karena menggunakan alat analisis yang sama yaitu dengan metode analisis basis LQ, DLQ dan Shif Share.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan

Proses pembangunan yang banyak terjadi di negara-negara maju hanya didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam hal ini, terutama faktor sumber daya manusianya yang telah maju dan berkualitas, sehingga mampu menggerakkan roda pembangunan dengan baik. Belum lagi dukungan modal dan teknologi tinggi serta penguasaan informasi yang cepat, membuat negara maju sulit dikejar oleh negara-negara berkembang (Sartono, 2002).

Pembangunan ekonomi baru dapat dikatakan ada kemajuan apabila pendapatan nasional naik diikuti perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, modernisasi, dan masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat dinamis, berpikir rasional dalam tindakannya (Suryana, 2000).

2. Pembangunan Ekonomi

Sesuai amanat GBHN 2001-2004, arah Kebijakan Penyelenggaraan Negara dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional 5 Tahun (PROPENAS) yang ditetapkan Presiden bersama DPR. Selanjutnya, Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Rapeta) yang memuat APBN yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. PROPENAS disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila,

landasan Konstitusional UUD 1945, seta landasan Operasional GBHN 2001-2004 (Anonim, 2001)

Secara konsep pembangunan nasional erat kaitannya dengan pembangunan politik. Gagasannya adalah mengemukakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya.. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus didukung kemampuan politik (ideologi, sistem politik), kemampuan ekonomi dan kondisi sosial dan pada gilirannya mampu menegakkan ketahanan nasional negara yang bersangkutan (Ndraha, 1990).

3. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Suryana (2000), permasalahan pokok pembangunan ekonomi terletak pada hasil pembangunan masa lampau, dimana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata menghadapi kekecewaan. Banyak wilayah yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Pada prinsipnya masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan menjadi penting dalam pembangunan. Penghapusan kemiskinan yang meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan strategi dan tujuan pembangunan.

Sebagaimana perencanaan dan proses pembangunan nasional, maka di tingkat daerah juga diperlukan adanya proses perencanaan dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBN dan APBD) dan masyarakat (Ndraha, 1990).

4. Peranan dan Potensi Sektor Pertanian

Menurut Mubyarto (1995), Indonesia masih merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja

yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian.

Mubyarto (1995), melihat bahwa sektor pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi. Misal peranannya dalam pembentukan pendapatan nasional, penyedia lapangan pekerjaan dan kontribusinya dalam perolehan devisa. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi setiap sektor saling terkait termasuk antara sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa.

Sektor pertanian memegang kedudukan penting di Indonesia sehingga sampai saat ini masih mendominasi pendapatan suatu daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan zaman kedudukan ini kian menurun kontribusinya dalam pendapatan nasional/regional, digantikan oleh sektor yang lain (Soekartawi, 1995).

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi dianggap pasif dan hanya sebagai penunjang. Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara barat, pembangunan ekonomi tampaknya memerlukan transformasi struktural ekonomi yang cepat yaitu yang semula mengutamakan kegiatan pertanian menjadi masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peranan utama pertanian adalah menyediakan tenaga kerja dan pangan yang cukup dengan harga yang murah untuk pengembangan industri yang dinamis sebagai sektor penting dalam semua strategi pembangunan ekonomi (Todaro, 1994).

Alasan utama terjadinya konsentrasi penduduk dan produksi dalam aktivitas pertanian dan produksi primer lainnya di negara-negara berkembang adalah bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah prioritas pertama setiap orang adalah pangan, pakaian dan papan (Todaro, 1994).

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian itu. Cara itu bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau dengan

meningkatkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan (Arsyad, 1992).

Terdapatnya kesadaran dan pengetahuan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan penting di negara-negara sedang berkembang, maka sektor ini tentu secara resmi akan mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan, terutama ditunjukkan dengan alokasi anggaran pembangunan. Di sini sektor pertanian akan mengkait pada banyak segi perekonomian. Industri-industri mesin dan peralatan pertanian dari input pertanian lainnya, baik yang berupa hasil teknologi biologis maupun kimiawi akan berkembang atau dikembangkan. Prasarana yang berupa waduk dan bendungan, jaringan irigasi, lahan-lahan serta bangunan-bangunan lainnya akan dibangun. Demikian pula akan ikut berkembang sistem transportasi serta lembaga-lembaga perdagangan dan jasa. Di sini kita melihat sektor pertanian menjadi motor pembangunan yang hasilnya merupakan dasar dari proses pembangunan selanjutnya (Rahardjo, 1986).

Kedudukan sektor pertanian dalam struktur PDB makin lama makin merosot sejalan dengan perkembangan ekonomi. Derajat kemerosotan ini berbeda untuk tiap daerah. Di satu pihak tergantung tingkat pertumbuhan di sektor pertanian itu sendiri dan di pihak lain tergantung tingkat pertumbuhan sektor lain. Apabila sektor pertanian tumbuh lebih lambat, sedangkan sektor lain lebih cepat, maka jelas kedudukan relatif sektor pertanian akan merosot baik dilihat dari segi struktur PDB maupun kesempatan kerja. Tapi sekalipun sektor pertanian tumbuh sangat cepat, namun kecepatan itu juga memerosotkan kedudukan sektor pertanian itu sendiri yaitu membawa pergeseran dalam struktur kesempatan kerja. Logikanya adalah bahwa pertumbuhan yang lebih cepat tentu disebabkan oleh faktor penggunaan teknologi yang lebih efisien. Dan teknologi yang lebih tinggi produktivitasnya ini tentu bersifat hemat tenaga kerja, sehingga menghalau tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor-sektor lainnya.

Dengan merosotnya kedudukan sektor pertanian, baik ditinjau dari segi produksi, kesempatan kerja dan produktivitas relatif antara sektor-sektor ekonomi, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan proses industrialisasi, itu tidak berarti bahwa peranan sektor pertanian tidak lagi penting dan bisa diabaikan, lebih-lebih

jika tanah dan usaha pertanian yang produktif cukup luas di suatu negara. Jika kita melihat barang-barang industri dan perdagangan lainnya yang berkaitan, yaitu yang menunjang atau berasal dari sektor pertanian, maka pertanian dapat dikatakan sebagai basis yang cukup luas dari kegiatan perekonomian, yaitu dalam menyediakan bahan makanan, baik yang lebih banyak berunsur karbohidrat, maupun protein serta bahan mentah industri (Rahardjo, 1986).

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang bisa digunakan, yaitu :

- a. Menurut pendekatan produksi, adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap kegiatan sub sektor atau sektor ekonomi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Sektor ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), sebagai berikut ;
 - 1) Pertanian
 - 2) Pertambangan dan Penggalian
 - 3) Industri Pengolahan
 - 4) Listrik, Gas dan Air Bersih
 - 5) Bangunan
 - 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
 - 7) Pengangkutan dan Komunikasi
 - 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 - 9) Jasa-jasa
- b. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima dari faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir, seperti :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan stok
- 5) Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

yang dihitung dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Dari ketiga pendekatan tersebut di atas, secara konsep seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2003).

6. Teori Ekonomi Basis

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Sehingga sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung, yang salah satunya dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Metode ini merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan

(tenaga kerja) total nasional (Budiharsono, 2001). Apabila nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sedangkan bila nilai $LQ \leq 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor non basis (Florida State University, 2002).

Tenaga kerja dan pendapatan pada sektor basis adalah fungsi permintaan dari luar (*exogenous*) yaitu permintaan dari luar yang mengakibatkan terjadinya ekspor dari wilayah tersebut. Di samping sektor basis, ada kegiatan-kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani pekerja (dan keluarganya) pada sektor basis dan kegiatan sektor basis itu sendiri. Kegiatan sektor pendukung seperti perdagangan dan pelayanan perseorangan disebut sektor non basis (Budiharsono, 2001).

Menurut Yuwono (1999) dalam Suyatno (2000), kelemahan metode LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya bahwa sektor basis tahun ini belum tentu akan menjadi sektor basis di waktu yang akan datang, sebaliknya sektor non basis pada saat ini mungkin akan menjadi sektor basis di waktu yang akan datang.

Teori ekonomi basis ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999).

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang atau jasa-jasa ke tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang atau jasa-jasa mereka kepada orang-orang di luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang, jadi

luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal (Glasson, 1977).

Inti dari model ekonomi basis (*economic base model*) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa termasuk tenaga kerja. Akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (*immobile*), seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah atau daerah pariwisata dan sebagainya. Sektor (industri) yang bersifat seperti ini disebut sektor basis.

Implisit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab dan akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian, sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*prime mover role*) (Glasson, 1977).

Untuk mengatasi kelemahan sehingga dapat diketahui perubahan sektoral digunakan varians dari LQ yang disebut *Dynamic Location Quotient* (DLQ), yaitu dengan mengintroduksi laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak.

7. Analisis Shift Share

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Dari analisis ini diketahui perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah pertumbuhannya cepat atau lambat. Dalam analisis ini diasumsikan

bahwa perubahan kesempatan kerja di suatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan, yaitu: komponen pertumbuhan nasional (*national growth component*) disingkat PN, komponen pertumbuhan proporsional (*proporsional or industrial mix growth component*) disingkat PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*regional growth component*) disingkat PPW (Budiharsono, 2005).

Menurut Tarigan (2002), analisis *shift share* adalah metode yang membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di wilayah dengan wilayah nasional. Metode ini lebih tajam dibanding metode LQ. Metode LQ tidak memberi penjelasan atas faktor penyebab perubahan tersebut sedang metode *shift share* memperinci penyebab perubahan itu atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah di dalam pertumbuhannya di dalam satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional. Ada juga yang meramalkan model analisis ini sebagai *industrial mix analysis* karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju wilayah pertumbuhan tersebut. Artinya apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak.

Metode ini menganalisis pergeseran struktur perekonomian wilayah perencanaan dalam hubungannya dengan perekonomian yang lebih tinggi tingkatannya (Budiharsono, 2001).

Pergeseran struktur ekonomi suatu daerah dapat dibagi dalam tiga komponen antara lain komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional, komponen pertumbuhan pangsa wilayah (Budiharsono, 2001).

8. Faktor Penentu Perubahan Posisi Sektor Perekonomian

Menurut Suyatno (2000), metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan posisi dan reposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah tanpa membahas

sebab perubahan tersebut. Pemahaman untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya reposisi sektoral adalah sangat penting karena merupakan kunci dasar untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mempertahankan sektor unggulan dalam persaingan.

Untuk mengetahui penyebab perubahan sektor digunakan analisis *Shift Share*, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan Indeks Total Keuntungan Daerah (ITKD) sebagai selisih dari laju perumbuhan PDRB daerah bagian dengan pertumbuhan PDRB daerah himpunan yang mewakili rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah bagian, yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{ITKD} = (\mathbf{g}_n - \mathbf{G})$$

- b. Dari keunggulan daerah secara total di atas, kemudian dapat dihitung keuntungan yang diperoleh oleh daerah bagian jika dibandingkan daerah bagian mempunyai laju yang sama dengan daerah himpunan, yaitu dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah bagian yang disebut *Total Shift Share*, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{TSS} = (\mathbf{g}_n - \mathbf{G}) \mathbf{Y}_{no}$$

Persamaan di atas (TSS) dapat diuraikan \mathbf{g}_{in} dan \mathbf{G}_i dan ditambahkan untuk sektor tersebut menjadi :

$$\text{TSS} = \sum(\mathbf{g}_n - \mathbf{g}_{in})\mathbf{X}_{ino} + \sum(\mathbf{G}_i - \mathbf{G})\mathbf{X}_{ino} + \sum(\mathbf{g}_{in} - \mathbf{G}_i)\mathbf{X}_{ino}$$

Berdasar analisis di atas menurut Wijayanto (1999) dalam Suyatno (2000), $\sum(\mathbf{g}_n - \mathbf{g}_{in})\mathbf{X}_{ino} + \sum(\mathbf{G}_i - \mathbf{G})\mathbf{X}_{ino}$ adalah *Structural Shift Share* yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral kendati laju pertumbuhan sektoralnya tepat sama. Sedangkan $\sum(\mathbf{g}_{in} - \mathbf{G}_i)\mathbf{X}_{ino}$ adalah *Location Shift Share* yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral kendati pangsa sektoral daerah bagian tepat sama. Nilai 0 menyatakan bahwa pangsa sektoral daerah bagian tepat sama dengan daerah himpunan, dengan laju pertumbuhan sektoral tepat sama. Nilai positif atau negatif menunjukkan keuntungan atau kerugian yang di derita daerah bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah himpunan.

9. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian disebutkan kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Harahap, 2002).

Tujuan umum otonomi daerah adalah untuk menghilangkan berbagai perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di daerah. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (lebih lancar, lebih mudah dan lebih cepat). Sehingga hanya masyarakat sendiri yang dapat menilai berhasil tidaknya otonomi daerah di suatu daerah (Mubyarto, 2001).

Tiap-tiap daerah perlu diberi kesempatan menumbuh kembangkan kepentingan dan cita-citanya sendiri. Kalaupun ada kepentingan nasional di suatu daerah, daerah harus diberi peluang untuk mencanangkan tujuan dan sasaran pembangunannya sendiri (Usman, 1998).

Daerah kabupaten/kota dianggap lebih dekat dengan rakyat dibanding propinsi. Dengan jumlah penduduk rata-rata hanya 540.000 jiwa, daerah kabupaten/kota dianggap berhak mempunyai lembaga legislatif sendiri dan dengan demikian dapat mengelola daerahnya secara demokratis sesuai aspirasi penduduknya.

C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah

Dengan pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya. Daerah tidak langsung sebagai komponen desentralisasi administrasi dan otonomi birokrasi, tetapi sudah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Pembangunan daerah yang dilakukan (baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan non ekonomi) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, semakin luas otonomi diberikan pada suatu daerah, maka akan semakin besar tanggungjawab daerah dan tentu saja juga semakin besar biaya penyelenggaraannya. Sehingga untuk dapat membangun daerah dengan baik, khususnya pada era otonomi daerah dewasa ini, pemerintah setempat perlu mengetahui sektor-sektor apa saja yang dapat dijadikan sektor basis baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dengan harapan sektor-sektor tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, maupun dalam rangka mendukung pengembangan sektor perekonomian secara keseluruhan.

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor atau sub sektor ekonomi tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), yaitu dengan membandingkan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor *i* pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor *i* pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) total nasional. Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi > 1 maka sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan, sedangkan bila nilai LQ suatu sektor atau sub sektor ekonomi ≤ 1 maka sektor atau sub sektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan (Florida State University, 2002).

Menurut Sambodo (2002) kelemahan dari metode LQ yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak dapat menangkap kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi untuk waktu yang akan datang. Karena sektor basis pada saat ini belum tentu akan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang, dan juga sebaliknya sektor non basis pada saat ini mungkin akan berubah menjadi sektor basis pada waktu selanjutnya.

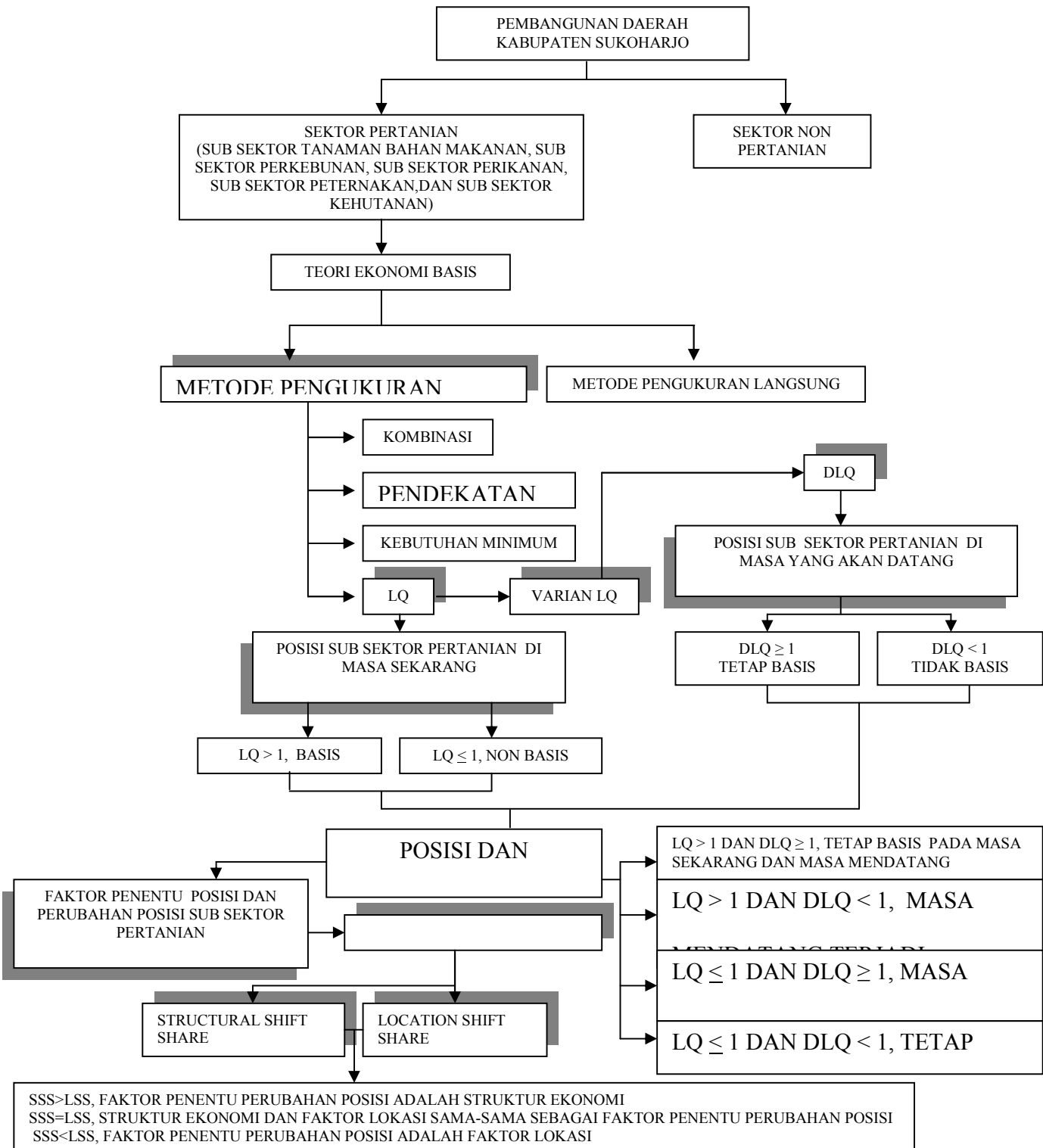
Dalam rangka mengatasi kelemahan metode LQ tersebut sehingga dapat diketahui perubahan sektoral digunakan metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ), yaitu dengan memperkenalkan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai

tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak.

Metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan posisi dan perubahan posisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa membahas sebab perubahan tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan posisi sangat penting untuk diketahui, karena merupakan kunci dasar untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mempertahankan sektor unggulan dalam persaingan.

Untuk mengetahui penyebab perubahan posisi sektor atau sub sektor digunakan analisis *Shift Share*, dengan langkah menentukan Indeks Total Keuntungan Daerah (ITKD) sebagai selisih dari laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan pertumbuhan PDRB daerah himpunan yang mewakili rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah bagian. Dari keunggulan daerah secara total tersebut, kemudian dapat dihitung keuntungan yang diperoleh oleh daerah bagian jika dibandingkan daerah bagian mempunyai laju yang sama dengan daerah himpunan, yaitu dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah bagian tersebut, yang disebut *Total Shift Share* (TSS). *Total Shift Share* (TSS) ini terdiri atas dua komponen yaitu *Structural Shift Share* (SSS) dan *Locational Shift Share* (LSS). *Structural Shift Share* yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral kendati laju pertumbuhan sektoral tepat sama. Sedangkan *Locational Shift Share* adalah perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral kendati pangsa sektoral daerah bagian tepat sama. Nilai 0 menyatakan bahwa pangsa sektoral daerah bagian tepat sama dengan daerah himpunan, dengan laju pertumbuhan sektoral tepat sama. Nilai positif atau negatif, menunjukkan keuntungan atau kerugian yang diderita daerah bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah himpunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui alur pemikiran dari penelitian ini, yang dapat disajikan dalam skema pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo

D. Asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi yang digunakan adalah :

1. Penduduk di Kabupaten Sukoharjo mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan Propinsi Jawa Tengah.
2. Sistem perekonomian tertutup artinya permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah dan kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Surakhmad (1982) penelitian deskriptif tertuju pada permasalahan yang ada pada masa sekarang. Penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang bekerja. Metode ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi arti data tersebut.

B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian

Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja atau *purposive*, yaitu cara pengambilan daerah lokasi dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari sifat-sifat sampel tersebut (Singarimbun, 1995).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan :

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan kabupaten/kotamadya lainnya di wilayah Karesidenan Surakarta, dimana rata-rata laju pertumbuhannya Kabupaten Sukoharjo berada pada peringkat keempat. Hal ini terlihat jelas dari Tabel 2

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Karesidenan Surakarta Tahun 2001 -2005

Kabupaten / Kota	Tahun					Rata-Rata
	2001	2002	2003	2004	2005	
Surakarta	4,08	5,31	6,49	5,60	5,15	5,33
Klaten	4,02	3,46	4,03	4,86	4,66	4,21

Boyolali	6,86	6,35	3,79	3,42	4,08	4,90
Wonogiri	2,55	3,86	2,77	4,11	4,14	3,49
Karanganyar	1,42	3,19	3,32	5,98	5,49	3,88
Sragen	2,26	2,93	3,26	4,93	5,16	3,71
Sukoharjo	4,05	3,58	3,59	4,33	4,11	3,93
Jawa Tengah	3,31	3,47	4,22	5,13	5,35	4,30

Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2005

2. Sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo masih menjadi andalan dalam perekonomian wilayah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB sebagai sektor nomor ketiga yang memberikan peran yang besar setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan hotel dan restoran, seperti terlihat dalam Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3 Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005

No	Lapangan Usaha	Persen (%)
1	Pertanian	20
2	Pertambangan dan Penggalian	1
3	Industri Pengolahan	30
4	Listrik, Gas dan Air Minum	2
5	Bangunan / Konstruksi	5
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	26
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	3
9	Jasa-jasa	8
PDRB		100

Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2005

3. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah pemasok kebutuhan hasil pertanian Kotamadya Surakarta dengan posisi yang cukup strategis yakni terletak di persimpangan jurusan Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, sehingga mendukung perkembangan pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini seperti yang terlihat dari Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4 Banyaknya Pengiriman Beras Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Ton)

No	Tahun	Jumlah
1	2001	15.145
2	2002	13.594
3	2003	6.562
4	2004	10.892

Sumber : PERUM BULOG SUB DRIVE III Surakarta

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan diperoleh dari BPS Kabupaten Sukoharjo, BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, Dinas Peternakan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

Data sekunder yang dipergunakan meliputi data PDRB Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga konstan tahun 2000 mulai tahun 2001-2005, Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo Dalam Angka 2005, Jawa Tengah Dalam Angka 2005, Profil dan Peluang Investasi Kabupaten Sukoharjo, Rencana Strategis Tahun 2001 -2005 Kabupaten Sukoharjo

Data sekunder yang digunakan merupakan data deret waktu (*time series*), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu (hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun). Data deret waktu bisa digunakan untuk melihat perkembangan kegiatan tertentu dan sebagai dasar untuk menarik suatu trend, sehingga bisa digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan yang sangat berguna bagi dasar perencanaan (Supranto, 2001).

D. Metode Analisis Data

1. Penentuan Harga Konstan 2000

Untuk menentukan PDRB atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara mendeflasikan PDRB atas dasar harga berlaku. Menurut Lipsey *et all* (1995), pendeflasian PDRB atas dasar harga berlaku menjadi PDRB atas dasar harga konstan digunakan *Deflator Implisit* atau Indeks Harga Implisit.

Bentuk formulasi dari *Deflator Implisit* adalah sebagai berikut :

$$Deflator\ implisit = \frac{PDRB\ ADHB\ tahun\ 2001 - 2005}{PDRB\ ADHK\ 2000\ tahun\ 2001 - 2005} \times 100\%$$

Kemudian ditambahkan oleh Sukirno (1994), PDRB atas dasar harga konstan dirumuskan sebagai berikut :

$$PDRB\ ADHK = \frac{IHI_0}{IHI_t} \times PDRB_t$$

Keterangan :

PDRB ADHK : PDRB ADHK tahun penelitian (2001-2005)

IHI₀ : Indeks Harga Implisit tahun dasar (2001)

IHI_t : Indeks Harga Implisit tahun penelitian (2001-2005)

PDRB_t : PDRB ADHB tahun penelitian (2001-2005)

t : tahun penelitian yaitu tahun (2001-2005)

2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengidentifikasi sektor perekonomian dan atau sub sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di wilayah Kabupaten Sukoharjo, digunakan rumus sebagai berikut :

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

LQ : indeks *Location Quotient*

v_i : PDRB sektor perekonomian/sub sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo

v_t : PDRB total daerah/sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo

V_i : PDRB sektor perekonomian/sub sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah

V_t : PDRB total daerah/sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah

Apabila nilai LQ suatu sektor > 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila nilai LQ suatu sektor ≤ 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor non basis.

3. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Untuk mengetahui perubahan posisi yang terjadi pada sektor perekonomian ataupun sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo digunakan metode DLQ, dengan rumus sebagai berikut :

$$DLQ = \left\{ \frac{(1+g_{ij})/(1+g_j)}{(1+G_i)/(1+G)} \right\}^t$$

Dimana :

g_{ij} : rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) sektor perekonomian/sub sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo

G_j : rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) daerah/ PDRB sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo

G_i : rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) sektor perekonomian/sub sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah

G : rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) daerah/PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah

t : kurun waktu penelitian (lima tahun)

Apabila diperoleh nilai $DLQ \geq 1$ berarti suatu sektor masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang, sedangkan apabila nilai $DLQ < 1$ berarti sektor tersebut tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

4. Analisis Gabungan LQ dan DLQ

Untuk melihat perubahan posisi yang dialami sektor perekonomian dan sub sektor pertanian digunakan analisis gabungan metode LQ dan DLQ, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai $LQ > 1$ dan $DLQ \geq 1$, berarti sektor perekonomian/ sub sektor pertanian tetap menjadi basis baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
- b. Jika nilai $LQ > 1$ dan $DLQ < 1$, berarti sektor perekonomian/sub sektor pertanian telah mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis pada masa yang akan datang.
- c. Jika nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ \geq 1$, berarti sektor perekonomian/ sub sektor pertanian telah mengalami reposisi dari non basis menjadi basis pada masa yang akan datang.
- d. Jika nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ < 1$, berarti sektor perekonomian/sub sektor pertanian tetap menjadi non basis baik pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

5. Analisis *Shift Share*

Untuk menentukan faktor penyebab perubahan posisi sektor ekonomi/sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo digunakan analisis *Shift Share*. Dengan persamaan Total *Shift Share* (TSS) dapat diuraikan menjadi beberapa komponen *Structural Shift Share* (SSS) dan *Locational Shift Share* (LSS) yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penentu perubahan posisi sektor perekonomian dan atau sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo

$$TSS = \sum(g_n - g_{in})X_{ino} + \sum(G_i - G)X_{ino} + \sum(g_{in} - G_i)X_{ino}$$

$$SSS = \sum(g_n - g_{in})X_{ino} + \sum(G_i - G)X_{ino}$$

$$LSS = \sum(g_{in} - G_i)X_{ino}$$

Kriteria :

- a. Jika nilai *Structural Shift Share* > *Locational Shift Share* berarti faktor yang paling menentukan terhadap terjadinya perubahan posisi sektor ekonomi/ sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo adalah faktor struktur ekonominya.
- b. Jika nilai *Structural Shift Share* < *Locational Shift Share* berarti faktor yang paling menentukan terhadap terjadinya perubahan posisi sektor ekonomi/ sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo adalah faktor lokasinya.
- c. Jika nilai *Structural Shift Share* = *Locational Shift Share* berarti faktor struktur ekonomi dan faktor lokasi sama-sama kuat dalam menentukan perubahan posisi sektor ekonomi/ sub sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

E. Pembatasan Masalah

Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data time series yaitu berupa data PDRB Kabupaten Sukoharjo dan data PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000, selama lima tahun dari tahun 2001-2005

F. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel

6. PDRB adalah jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa dari kegiatan ekonomi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu

tahun dan dinyatakan dalam rupiah. Dalam penelitian di Kabupaten Sukoharjo ini digunakan PDRB dengan pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan.

7. Sektor adalah lingkungan usaha. Dalam penelitian di Kabupaten Sukoharjo ini perekonomian dibagi menjadi 9 sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa, dan jasa-jasa perusahaan, sektor jasa-jasa dan pemerintahan.
8. Sektor pertanian adalah sektor di mana dalam proses produksinya berhubungan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan atau hewan serta ikan. Sektor pertanian mencakup 5 sub sektor yaitu : tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
9. Sektor basis adalah sektor yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di Kabupaten Sukoharjo maupun untuk pasar diluar Kabupaten Sukoharjo (di luar daerah Kabupaten Sukoharjo). Dalam penelitian kriteria sektor basis yaitu jika $LQ > 1$.
10. Sektor non basis adalah sektor yang hanya dapat menghasilkan barang dan jasa untuk pasar lokal. Dalam penelitian ini, kriteria sektor non basis adalah $LQ \leq 1$.
11. Perubahan posisi sektoral adalah perubahan posisi sektor pada masa yang akan datang terhadap masa sekarang. Pergeseran ini dalam hal sektor Basis menjadi Non Basis atau sebaliknya. Pada penelitian ini untuk mengukur perubahan posisi menggunakan analisis DLQ.
12. LSS (*Locational Shift Share*) adalah faktor penentu perubahan posisi sektor dan sub sektor pertanian karena faktor lokasi sedangkan SSS (*Structural Shift Share*) adalah faktor penentu perubahan posisi sektor dan sub sektor pertanian karena faktor struktur ekonominya.
13. Faktor penentu perubahan posisi sektoral adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan posisi dari sektor-sektor perekonomian atau posisi dari sub sektor pertanian. Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan posisi sektoral tersebut

yaitu faktor lokasi (*Locational Shift Share*) dan faktor struktur ekonominya (*Structural Shift Share*) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. $SSS > LSS$, Faktor penentu perubahan posisi adalah struktur ekonomi
 - b. $SSS = LSS$, Struktur ekonomi dan faktor lokasi sama-sama sebagai faktor penentu perubahan posisi
 - c. $SSS < LSS$, Faktor penentu perubahan posisi adalah faktor lokasi
14. Pendeflasian yaitu mengubah PDRB nominal (PDRB atas dasar harga berlaku) menjadi PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan). Di dalam penelitian ini PDRB atas dasar harga berlaku 2001-2005 diubah menjadi PDRB atas dasar harga konstan 2005, yaitu dengan membandingkan Indeks Harga Dasar (2005) dengan Indeks Harga tahun penelitian (2001-2005) kemudian dikalikan dengan PDRB atas dasar harga berlaku tahun penelitian. Deflator implisit merupakan persentase perbandingan

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Alam

1. Letak Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara $7^{\circ}32'17''$ LS dan $110^{\circ}42'06,79''$ - $110^{\circ}57'33,7''$ BT. Wilayah Kabupaten Sukoharjo dibatasi oleh enam kabupaten atau kota, yaitu :

Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten
Wonogiri
Sebelah Barat : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 Ha atau sekitar 1,43 % luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo mempunyai ketinggian antara 80 m dan 125 m di atas permukaan laut yang dilewati Sungai Bengawan Solo dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) sepanjang 35 Km.

Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi dua belas kecamatan, yang terdiri atas 167 desa atau kalurahan. Pembagian wilayah kecamatan tersebut meliputi : Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartosuro. Kecamatan Polokarto merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 17 desa dan kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Bulu, Kecamatan

Tawanghari dan Kecamatan Kartosuro dengan masing-masing desa sebanyak 12 desa.

3. Keadaan Tanah.

Keadaan topografi di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar terletak pada kemiringan lereng 0–3% (datar) meliputi Kecamatan Mojolaban, Grogol, Sukoharjo, Baki, Gatak dan Kartosuro. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng antara 0-25% meliputi Kecamatan Tawanghari, Nguter, Bendosari, dan Polokarto. Kecamatan Weru memiliki kemiringan lereng antara 0-40%, sedangkan Kecamatan Bulu memiliki kemiringan lereng lebih dari 40%. Tempat tertinggi di atas permukaan laut adalah Kecamatan Bulu yaitu 350 dpl dan terendah yaitu Kecamatan Grogol yaitu 89 dpl.

4. Keadaan Iklim.

Keadaan iklim di daerah penelitian diklasifikasikan menurut *system Scmitdh-Ferguson*. Klasifikasi ini dapat menunjukkan rata-rata prosentase perbandingan antara jumlah bulan basah dan bulan kering selama satu tahun. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : (Wisnubroto, et al., 1989)

$$Q = \frac{\text{Rata-rata jumlah bulan kering}}{\text{Rata-rata jumlah bulan basah}} \times 100\%$$

Bulan kering : bulan yang curah hujannya < 60 mm.

Bulan basah : bulan yang curah hujannya > 100 mm.

Bulan lembab : bulan yang curah hujannya 60 mm ≤ ... ≤ 100 mm.

Menurut *Scmitdh-Ferguson*, berdasarkan nilai Q, tipe iklim suatu daerah dapat diklasifikasikan menjadi 8, yaitu :

- (1) Tipe A, yaitu sangat basah (0% ≤ Q ≤ 14,3%)
- (2) Tipe B, yaitu basah (14,3% ≤ Q ≤ 33,3%)
- (3) Tipe C, yaitu agak basah (33,3% ≤ Q ≤ 60,0%)

- (4) Tipe D, yaitu sedang ($60,0\% \leq Q \leq 100\%$)
- (5) Tipe E, yaitu agak kering ($100\% \leq Q \leq 167\%$)
- (6) Tipe F, yaitu kering ($167\% \leq Q \leq 300\%$)
- (7) Tipe G, yaitu sangat kering ($300\% \leq Q \leq 700\%$)
- (8) Tipe H, yaitu luar biasa kering ($\geq 700\%$)

Dari data curah hujan di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 dapat diketahui bahwa rata-rata curah hujan 1.708 mm dan rata-rata hari hujan 89 hari. Perincian curah hujan dan hari hujan tersaji dalam Tabel 5. berikut :

Tabel 5. Rata-rata Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
Januari	199	9
Februari	205	13
Maret	333	14
April	205	12
Mei	21	2
Juni	60	3
Juli	74	4
Agustus	13	1
September	23	3
Oktober	100	6
November	131	8
Desember	363	20
Rata-rata	144	8

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo 2005

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui jumlah bulan basah selama tahun 2005 di Kabupaten Sukoharjo adalah 8, sedangkan jumlah bulan kering 3, sehingga besarnya nilai Q adalah :

$$\begin{aligned}
 Q &= 3/8 \times 100\% \\
 &= 37,5\%
 \end{aligned}$$

Nilai Q sebesar 37,5%, menurut klasifikasi pembagian tipe iklim *Scmidt-Ferguson*, maka Kabupaten Sukoharjo termasuk tipe iklim C yaitu daerah beriklim agak basah.

B. Keadaan Penduduk

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dengan melihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin maka dapat diketahui jumlah penduduk serta besarnya *sex ratio* di suatu daerah, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Keadaan penduduk Kabupaten Sukoharjo menurut jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Keadaan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	405.831	49,42
2.	Perempuan	415.382	50,58
Jumlah		821.213	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

Tabel 6 memperlihatkan bahwa di Kabupaten Sukoharjo jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh, terlihat dari persentasenya yang hanya terpaut 1,16%, yaitu 50,58% untuk penduduk perempuan dan 49,42% untuk penduduk laki-laki dari keseluruhan penduduk Kabupaten Sukoharjo.

Angka *sex ratio* dapat dihitung besarnya dengan cara membagi jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Besarnya *sex ratio* Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 adalah 98, ini berarti bahwa tiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Sukoharjo terdapat 98 penduduk laki-laki.

2. Penduduk Menurut Umur

Keadaan penduduk menurut umur bagi suatu daerah dapat digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk yang produktif dan angka beban tanggungan (*dependency ratio*). Untuk mengetahui besarnya rasio beban tanggungan maka dapat digunakan rumus : (Mantra, 2003)

$$DR = \frac{\text{penduduk usia 0-14 tahun} + \text{penduduk usia 65 keatas tahun}}{\text{penduduk usia 15-64 tahun}} \times 100$$

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	28.146	26.292	54.438
2	5-14	68.138	65.059	133.197
3	15-24	80.419	85.871	166.290
4	25-64	199.643	203.791	403.434
5	>64	29.485	34.369	63.854
Jumlah		405.831	415.382	821.213

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

Berdasarkan Tabel 7, maka penduduk di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan produktivitasnya dapat dikelompokkan :

1. Penduduk usia belum produktif (0-14) : 187.635 jiwa
2. Penduduk usia produktif (15-64) : 558.724 jiwa
3. Penduduk usia tidak lagi produktif (>64) : 63.854 jiwa

$$DR = \frac{\text{penduduk usia (0-14 th)} + \text{penduduk usia (...>64 th)}}{\text{penduduk usia (15-65 th)}} \times 100$$

$$= \frac{187.635 + 63.854}{558.724} \times 100\%$$

$$= 45,01$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio beban tanggungan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 adalah 45. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 45 penduduk usia non produktif.

3. Penduduk menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan masyarakat. Apabila penduduk di suatu daerah telah mengenyam pendidikan, terutama pendidikan tinggi, maka potensi untuk pengembangan daerah tersebut besar. Tingkat pendidikan di suatu daerah dipengaruhi antara lain oleh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi serta ketersediaan sarana pendidikan yang ada. Keadaan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Banyaknya Penduduk (10 tahun keatas) Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 - 2004

No.	Pendidikan yang ditamatkan	2002	2003	2004
1.	Tidak/Blm Pernah Sekolah	110.527	101.625	109.709
2.	Tidak/Blm Tamat Sekolah	112.303	119.165	99.377
3.	Tamat SD/MI	175.362	182.995	210.139
4.	Tamat SLTP/MTS	117.635	120.961	131.855
5.	Tamat SLTA/MA	127.912	126.073	120.351
6.	Akademi/Diploma	16.882	17.547	12.253
7.	S1/S2/S3	21.240	22.243	12.464
Jumlah		681.661	690.809	693.140

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan atau lulusan terbanyak penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2004 secara berurutan adalah SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/MA yang masing-masing sebanyak 210.139 orang, 131.855 orang dan 120.351 orang. Namun jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya penduduk dengan tingkat pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS selalu bertambah. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/MA, Akademi/Diploma dan SI/S2/S3 mengalami penurunan.

4. Penduduk Menurut lapangan Usaha Utama

Salah satu penunjang utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan bagi daerah tersebut. Untuk mengetahui banyaknya jenis pekerjaan atau lapangan usaha utama di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

No.	Jenis Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian Tanaman Pangan	102.104
2.	Perkebunan	555
3.	Perikanan	347
4.	Peternakan	2.794
5.	Pertanian Lainnya	3.999
6.	Industri Pengolahan	109.130
7.	Perdagangan	90.997
8.	Jasa	45.622
9.	Angkutan	7.301
10.	Lainnya	41.500
Jumlah		404.349

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa jumlah terbesar pekerjaan penduduk adalah di sektor industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi dan atau barang setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Industri pengolahan ini juga meliputi industri kecil obat tradisional.

Jumlah terbesar kedua pekerjaan penduduk adalah di sektor pertanian tanaman pangan, dan jumlah terbesar ketiga pekerjaan penduduk adalah di sektor perdagangan.

C. Keadaan Perekonomian

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia semakin digalakkan dengan semakin besar dana yang dikucurkan. Di Kabupaten Sukoharjo, koperasi mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupaun anggotanya. Pada tahun 2005 koperasi yang ada sebanyak 438 dengan jumlah anggota 224.931. Data perkembangan jumlah dan anggota koperasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2001 – 2005 dapat dilihat pada Tabel 10 :

Tabel 10. Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggotanya Di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Jumlah Koperasi	Anggota
2001	387	117.243
2002	412	117.876
2003	428	118.550
2004	432	118.755
2005	438	224.931

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

Laju perumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,94 % pada tahun 2005. Sektor yang memegang peranan penting tahun 2005 adalah industri pengolahan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 30,49 % disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian sebesar 27,91 % dan 20,36 %. Data PDRB Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 – 2005 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	641.195,48	740.794,68	861.842,50	757.823,02	802.838,94
2	Pertamb dan Pggalin	25.029,98	31.142,75	42.236,04	33.198,58	33.839,31
3	Industri Pengolahan	608.294,19	825.083,74	975.392,44	1.162.044,49	1.202.242,45
4	Listk, Gas & Air Mnm	18.384,02	27.681,71	44.072,93	36.532,38	37.066,23
5	Bangunan / Konstruksi	99.969,88	137.693,22	122.589,87	147.012,09	157.679,83
6	Perdagn, Hotl & Restn	522.019,19	679.310,95	818.237,89	1.057.987,10	1.100.398,77
7	Pengangk & Kom	106.690,12	144.425,55	198.982,07	161.747,80	169.798,34
8	Keun, Sw & Jasa Persh	92.864,86	118.530,83	150.251,13	127.049,88	131.413,31
9	Jasa-jasa	226.400,91	284.452,63	370.031,37	302.817,38	306.511,30
PDRB		2.380.848,58	2.803.568,89	3.539.563,31	3.786.212,74	3.941.788,47

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

D. Kondisi Umum Sektor Pertanian

1. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama)

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyanggah pangan di Jawa Tengah, sehingga produktivitasnya dipacu terus. Pada tahun 2005 produktivitas padi berhasil mencapai 64,3 Kw/Ha. Pada tahun 2005 luas panen padi naik sebesar 1,18 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk luas panen dan produksi tanaman palawija dibandingkan tahun 2004 seperti jagung, mengalami penurunan 2,11 % sedang produksinya mengalami kenaikan sebesar 80,11 %, ketela pohon luas panen dan produksi naik sebesar 1,29 % dan 1,05 %, ketela rambat naik 16,67 % dan 14,20 %, kacang tanah naik sebesar 2,92 % dan 9,44 %, kedelai turun 9,38 % dan 7,28 %, kacang hijau naik 260 % dan 241,03 %.

Produksi beberapa jenis sayuran (kacang panjang, cabe, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam) dibanding tahun 2004 mengalami penurunan. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya terong dan kangkung.

Produksi beberapa jenis buah-buahan seperti kedondong, mangga, belimbing, rambutan, jambu biji, sawo, durian, pisang, papaya, nangka, mlinjo, semangka dan melon dibandingkan tahun 2004 juga mengalami fluktuasi. Beberapa jenis komoditas buah-buahan yang mengalami kenaikan produksi adalah blimbing, rambutan, kedondong, pisang, mlinjo, papaya, nangka, sawo, durian dan pisang. Sedangkan yang mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun 2005 adalah semangka, jeruk, jambu biji dan melon.

2. Sub Sektor Tanaman Perkebunan

Luas tanaman dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo yang pada tahun 2005 mempunyai andil yang cukup luas adalah kelapa 1.416,49 Ha, kapuk 674,32 Ha, Jambu mete 611,60 Ha, Tebu 826,31 Ha. Dibandingkan pada tahun 2004 produksi kelapa naik 4,60 %, kapuk naik 22,13 % sedangkan tebu turun 2,79 %

3. Sub Sektor Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Sukoharjo adalah ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda sedangkan ternak kecil diantaranya kambing, domba, ayam ras dan itik.

Populasi ternak besar pada tahun 2005 untuk sapi tercatat sebanyak 25.106 ekor, kerbau sebanyak 1.975 ekor dan kuda 209 ekor. Sedangkan ternak kecil populasi yang tercatat untuk kambing sebanyak 36.169 ekor, domba sebanyak 33.394 ekor, ayam ras sebanyak 1.138.035 ekor dan itik 85.974 ekor.

4. Sub Sektor Kehutanan

Hutan mempunyai fungsi antara lain sebagai penghasil komoditi kayu, wisata alam, dan sebagai penyeimbang lingkungan. Pembangunan di bidang kehutanan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan telah menunjukkan kemajuan dibandingkan pada tahun 2001 kontribusinya terhadap PPDRB sebesar 9.752,94 dari total PDRB sebesar 1.157.846,99 menjadi sebesar 22.819,68 PDRB tahun 2005 dari total PDRB sebesar 3.941.788,47.

5. Sub Sektor Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 diantaranya budidaya ikan di kolam dan ikan di karamba. Selain itu produksi ikan diperoleh dari penangkapan ikan di perairan umum serta pembenihan ikan. Dibandingkan tahun 2004 total luas area untuk budidaya perikanan mengalami kenaikan 13,63 %.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Location Quotient*

a. Sektor Perekonomian

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah yang bersangkutan. Sektor perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk konsumsi lokal serta mampu mengekspor ke luar wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang hanya mampu menghasilkan barang dan jasa untuk konsumsi lokal serta belum mampu mengekspor ke luar wilayah yang bersangkutan.

Untuk mengetahui apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis ataukah sektor non basis dengan menggunakan metode *Location Quotient* yang merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan sektor *i* pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor *i* pada tingkat nasional terhadap pendapatan total nasional. Apabila nilai LQ lebih dari 1 maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sedangkan bila nilai LQ kurang dari atau sama dengan 1 maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian suatu wilayah.

Perekonomian di Kabupaten Sukoharjo didukung oleh sembilan sektor perekonomian yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Hasil dari analisis *Location Quotient* untuk sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo tahun 2001-2005 dapat dilihat dalam Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1	Pertanian	1,2113	1,1726	1,1581	0,9501	0,9736	1,0931
2	Pert & galian	1,0494	1,1133	1,1899	0,8947	0,8445	1,0183
3	Industri peng	0,8168	0,9239	0,8609	0,9473	0,9463	0,8990
4	List, gas & air bsh	1,0514	1,2449	1,6406	1,2301	1,1401	1,2614
5	Bangunan	0,9018	0,9879	0,6477	0,7078	0,7188	0,7928
6	Perd, htl & rest	1,0092	1,1340	1,0793	1,3387	1,3286	1,1780
7	Pengk & kom	0,9547	1,0792	1,1674	0,8910	0,8818	0,9948
8	Keu, persw & js	1,0484	1,1498	1,1789	0,9441	0,9411	1,0525
9	Jasa-jasa	0,9552	1,1234	1,0434	0,7948	0,7772	0,9388

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 9

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* terhadap sembilan sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000, diketahui bahwa lima dari sembilan sektor perekonomian tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan untuk empat sektor ekonomi yang lain yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa merupakan sektor non basis dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo.

Sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2001-2003 selalu menjadi sektor basis dalam perekonomian di wilayah ini. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005 mengalami penurunan menjadi sektor Non Basis. Nilai LQ selama tahun 2001-2003 relatif stabil walaupun ada penurunan pada tahun 2004 dan 2005 dengan nilai LQ rata-rata selama lima tahun penelitian sebesar 1,0931. Ini berarti sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo selain mampu memenuhi kebutuhan wilayah Kabupaten Sukoharjo juga mampu mengekspor ke luar wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Kemampuan sektor pertanian menjadi sektor basis di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2001-2005 didukung oleh keadaan geografis Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai ketinggian permukaan bumi yang

cukup bervariasi, sehingga cukup sesuai untuk tempat tumbuh berbagai jenis tanaman

Di samping hal tersebut, dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo seluas 46.666 ha terbagi atas lahan sawah seluas 21.178 ha (45,38 %) sedangkan sisanya seluas 25.488 ha (54,62 %) merupakan lahan bukan sawah. Dari lahan sawah yang mempunyai pengairan teknis seluas 14.570 ha, irigasi setengah teknis 2.250 ha, irigasi sederhana 2.053 ha dan tadah hujan seluas 2.305 ha. Dengan lahan yang seperti itu pada tahun 2005 sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 802.838.940,00 dalam PDRB Kabupaten Sukoharjo

Sektor pertanian dari Kabupaten Sukoharjo berada di urutan pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam hal produktivitas padi per hektarnya yang mencapai 58,50 kuintal per hektar dibandingkan kota/kabupaten yang lainnya

Di sektor peternakan, Kabupaten Sukoharjo terdapat sentra pengembangan sapi jenis metal yang ada di Kecamatan Nguter dan Mojolaban. Dari sektor perikanan, Kabupaten Sukoharjo mempunyai potensi terutama di bidang perikanan darat karena kondisi geografisnya yang jauh dari laut dengan sistem kolam dan karamba. Wilayah yang memberikan produksi ikan tertinggi dari Kecamatan Sukoharjo

Seperti halnya sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian juga merupakan sektor basis dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo dengan nilai LQ yang relatif konstan untuk tiap tahunnya. Nilai LQ rata-rata sektor ini sebesar 1,0183. Kabupaten Sukoharjo mempunyai potensi bahan tambang yang jumlah persediaannya belum diketahui secara pasti. Usaha pertambangan yang diusahakan di wilayah Kabupaten Sukoharjo diantaranya adalah penambangan bahan-bahan galian lain seperti batu kali, pasir, kerikil, dan tanah liat di Kecamatan Nguter, Bulu dan Baki.

Sektor industri pengolahan antara tahun 2001-2005 merupakan sektor non basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Nilai LQ sektor ini selama lima tahun penelitian selalu lebih kecil dari satu dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,8990. Meskipun nilai $LQ < 1$ yang menunjukkan bahwa sektor

industri merupakan sektor basis, namun pada kenyataannya banyak produk dari industri pengolahan yang dijual ke luar daerah seperti produk tekstil dan obat. Meskipun demikian ketergantungan Sukoharjo terhadap produk industri pengolahan dari luar daerah lebih banyak lagi sehingga menjadi daerah Kabupaten Sukoharjo sektor industrinya non basis. Sektor industri pengolahan sampai dengan tahun 2003 masih didominasi oleh industri kecil dan industri rumah tangga, yaitu industri jamu dimana Kabupaten Sukoharjo merupakan sentra pengembangan industri jamu. Dengan kondisi yang seperti itu banyak keterbatasan yang dimiliki di bidang industri pengolahan dengan skala industri yang berskala kecil seperti itu. Menurut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Program Pembangunan Daerah 2001-2005, keterbatasan yang ada di sektor ini antara lain :

1. Keterbatasan dan kontinuitas penyediaan bahan baku yang memenuhi persyaratan tertentu.
2. Keterbatasan tenaga ahli dan terampil.
3. Keterbatasan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan.
4. Keterbatasan penguasaan permodalan dan keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan.

Dengan kondisi industri pengolahan yang seperti itu menyebabkan rendahnya daya saing produk hasil industri pengolahan. Sehingga produk industri pengolahan dari Kabupaten Sukoharjo masih kalah bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain, yang pada akhirnya mengakibatkan keterbatasan dalam hal pemasarannya yaitu hanya cenderung untuk pasar lokal saja. Di samping itu, masuknya produk industri pengolahan dari wilayah lain dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik akan menyebabkan produk industri pengolahan Kabupaten Sukoharjo semakin kesulitan untuk berkembang.

Sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2001-2005 selalu menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Nilai LQ sektor ini mempunyai nilai LQ rata-rata tertinggi yaitu 1,2614 dibandingkan sektor perekonomian yang lainnya. Nilai LQ rata-rata sektor ini membuktikan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih dari tahun 2001 sampai dengan 2005 mampu

untuk menjadi sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini mengingat listrik, gas dan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang sangat penting.

Sektor bangunan selama lima tahun penelitian merupakan sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo dengan nilai LQ rata-rata sebesar 0,7928. Hal ini berarti sektor ini belum mampu menghasilkan bahan-bahan bangunan maupun gedung bangunan untuk kebutuhan lokal apalagi mengekspor keluar wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran selama lima tahun penelitian merupakan sektor basis bagi perekonomian di wilayah ini. Nilai LQ antara tahun 2001-2005 selalu lebih besar dari satu dengan nilai LQ rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 1,1780. Kondisi ini disebabkan karena sudah semakin baik kualitas fisik perdagangan yang dibuktikan dengan perbaikan sarana pasar, sudah semakin maju promosi hasil produk asli Sukoharjo seperti jamu, dan mulai dididik tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang perdagangan. Usaha perhotelan dan restoran di Kabupaten Sukoharjo mulai berkembang dengan baik dengan munculnya hotel-hotel melati di berbagai wilayah Kabupaten Sukoharjo terutama di Kecamatan Sukoharjo dan Kartasura dimana jumlah hotel yang ada sebanyak 8 buah dengan rincian 1 buah hotel bintang dua yaitu hotel Sadinah di Kartasura dan 7 hotel kelas melati dimana 4 buah berada di Kartasura, 2 buah di Sukoharjo dan 1 buah di gatak (Sukoharjo Dalam Angka 2005)

Sektor pengangkutan dan komunikasi antara tahun 2002-2003 menjadi sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk tahun pertama penelitian yaitu tahun 2001 sektor ini merupakan sektor non basis dengan nilai LQ sebesar 0,9547. Nilai LQ sektor ini antara tahun 2002-2003 cukup berfluktuasi yaitu sebesar 1,0792 pada tahun 2002, lalu meningkat menjadi 1,1674 pada tahun 2003, kemudian menurun pada tahun 2004 menjadi 0,8910 dan tahun 2005 menjadi 0,8818 sehingga nilai rata-rata LQ selama tahun penelitian sebesar 0,9948, yang berarti sektor ini merupakan sektor non basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai nilai LQ yang fluktuatif. Sektor ini pada tahun pertama sampai tahun ketiga penelitian merupakan sektor basis dengan nilai LQ masing-masing sebesar 1,0484, 1,1498 dan 1,1789. Kemudian mulai tahun 2004 nilai LQ sektor ini mengalami penurunan yaitu menjadi 0,9441 dan 0,9411. Meskipun pada tahun 2004 dan 2005 mengalami penurunan namun rata-rata nilai LQnya masih diatas angka satu yaitu 1,0525 sehingga sektor ini merupakan sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo

Nilai LQ sektor jasa-jasa pada tahun 2002 dan 2003 mampu menjadi sektor basis yaitu dengan nilai LQ 1,1234 dan 1,0434 walaupun di awal tahun penelitian nilai LQ dibawah angka satu yaitu 0,9552. Pada tahun 2004 dan 2005 nilai LQnya terus menurun menjadi 0,7948 dan 0,7772. Nilai LQ rata-rata sektor jasa-jasa selama lima tahun penelitian yaitu sebesar 0,9388 yang berarti sektor ini merupakan sektor non basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo.

b. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang terdiri atas lima sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, kehutanan dan perikanan. Hasil dari analisis *Location Quotient* untuk sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo dapat disaksikan dalam Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Nilai LQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005

No	Sub sektor	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1	Tabama	1,0890	1,1624	1,2629	1,0651	1,0586	1,1276
2	Tan Perkbun	0,4061	0,4213	0,3814	0,3581	0,3106	0,3755
3	Peternakan	1,6751	1,7509	1,8132	1,4846	1,5798	1,6607
4	Kehutanan	1,4899	1,6109	2,8933	1,8127	1,2259	1,8065
5	Perikanan	0,0862	0,1141	0,1283	0,1263	0,1493	0,1208

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 14

Berdasarkan hasil analisis LQ terhadap lima sub sektor dalam sektor pertanian diketahui bahwa tiga sub sektor merupakan sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo, yaitu sub sektor tanaman bahan

makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan. Sedangkan untuk dua sub sektor yang lain yaitu sub sektor tanaman perkebunan rakyat dan sub sektor perikanan merupakan sub sektor non basis bagi perekonomian di wilayah ini.

Sub sektor tanaman bahan makanan antara tahun 2001-2005 selalu menjadi sub sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Nilai LQ sub sektor ini selama lima tahun penelitian tersebut relatif konstan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,1276. Hal ini karena produk-produk sub sektor tabama seperti padi dan palawija dan buah-buahan yang dihasilkan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sub tabama merupakan sub sektor penyedia bahan makanan pokok dan penyedia bahan makanan sehari-hari bagi masyarakat.

Sub sektor tanaman perkebunan rakyat selama lima tahun penelitian merupakan sub sektor non basis dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Nilai LQ sub sektor ini antara tahun 2001-2005 selalu kurang dari 1 pada tahun 2001 sebesar 0,4061, kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,4213 pada tahun 2002, lalu turun menjadi 0,3814 pada tahun 2003, pada tahun 2004 mengalami penurunan lagi menjadi 0,3581 dan menurun menjadi 0,3106 pada tahun 2005. Nilai rata-rata LQ selama tahun penelitian sebesar 0,3755. Hal ini karena adanya alih fungsi lahan perkebunan, banyak lahan yang berubah dari lahan perkebunan menjadi tempat pemukiman dan industri.

Nilai LQ sub sektor peternakan antara tahun 2001-2005 selalu diatas angka satu sehingga sektor ini merupakan sektor basis. Hal ini disebabkan animo masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan ternak baik ternak besar maupun ternak kecil. Jenis ternak yang banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah ayam ras maupun bukan ras, ternak sapi, kambing dan domba. Dengan jumlah ternak masing-masing pada tahun 2005 untuk ternak ayam ras sebanyak 1.784.192 ekor, buras sebanyak 641.751 ekor, sapi sebanyak 25.106 ekor, kambing sebanyak 36.169 ekor dan domba sebanyak 33.394 ekor. Ada juga ternak lain yang dikembangkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yaitu kuda dan kerbau namun jumlahnya kecil dimana pada tahun 2005 jumlah ternak tersebut adalah 209 ekor dan 1975 ekor. Banyaknya jumlah dan jenis ternak ini

menyebabkan ketersediaan ternak yang melimpah sehingga sektor peternakan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk daerah di Kabupaten Sukoharjo saja tetapi juga mampu mengekspor ke luar daerah Sukoharjo.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga mendukung pemberdayaan ternak ini dengan memberikan kemudahan mendirikan peternakan pada wilayah yang jauh dari pemukiman, penyuluhan yang berkala dan pasar sapi yang terdapat di Kecamatan Mojolaban. Permintaan konsumsi masyarakat akan daging ternak ayam, sapi maupun telur ayam menjadikan sektor peternakan berkembang dengan baik. Sehingga selain mampu memenuhi kebutuhan lokal di Kabupaten Sukoharjo sebagian hasilnya dijual ke daerah sekitarnya misalnya ke pasar Wonogiri, Karanganyar dan Boyolali.

Nilai LQ sub sektor ternak tahun 2001 sebesar 1,6751, meningkat menjadi 1,7509 pada tahun 2002 kemudian meningkat lagi pada tahun 2003 menjadi 1,812. Pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1,4846 dan tahun 2005 mampu naik kembali menjadi 1,5798. Rata-rata nilai LQ selama lima tahun adalah 1,6607.

Berdasarkan hasil analisis LQ, selama lima tahun penelitian sub sektor kehutanan termasuk sub sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo, karena antara tahun 2001-2005 nilai LQ dari sub sektor ini selalu lebih besar dari satu dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,8065.

Seperti halnya sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor perikanan juga termasuk sub sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun penelitian dengan nilai LQ rata-rata untuk sub sektor ini sebesar 0,1208. Hal ini berarti sektor perikanan hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk daerahnya sendiri di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini terkait dengan masih baru dalam pengembangannya. Jenis usaha yang banyak dilakukan masyarakat adalah secara swadaya seperti pemeliharaan lele di Desa Gumpang. Meskipun sudah terdapat Waduk Mulur dan DAM Colo, namun ketersediaan air yang kurang masih menjadi kendala bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga banyak

tambak yang ketersediaan airnya tergantung pada aliran dari sungai Bengawan Solo.

B. Analisis *Dynamic Location Quotient*

a. Sektor Perekonomian

Metode Location Quotient mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan metode LQ tersebut yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak dapat menangkap kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk waktu yang akan datang. Karena sektor basis pada saat ini belum tentu akan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang dan juga sebaliknya sektor non basis pada saat ini mungkin akan berubah menjadi sektor basis pada masa selanjutnya.

Dalam rangka mengatasi kelemahan metode LQ tersebut sehingga dapat diketahui perubahan sektoral digunakan metode Dynamic Location Quotient (DLQ) yaitu dengan mengintroduksi laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak.

Hasil dari analisis metode Dynamic Location Quotient (DLQ) terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo dapat disaksikan dalam Tabel 14 berikut ini.

Tabel 14. Nilai DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo

No	Lapangan Usaha	DLQ	Keterangan
1	Pertanian	0,0364	Non Basis
2	Pertambangan & galian	0,0206	Non Basis
3	Industri pengolahan	0,0279	Non Basis
4	Listrik, gas dan air bersih	1,6629	Basis
5	Bangunan	0,8345	Non Basis
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,5464	Basis
7	Pengangkutan & komunikasi	0,0302	Non Basis
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	1,5368	Basis
9	Jasa-jasa	0,4452	Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 15

Berdasarkan hasil analisis DLQ dalam Tabel 14 tersebut terlihat bahwa dari sembilan sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, tiga di antaranya dapat diharapkan untuk dapat menjadi sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Ketiga sektor ekonomi tersebut yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Nilai DLQ ketiga sektor ekonomi tersebut > 1 , nilai DLQ tertinggi sebesar 1,6629 dimiliki oleh sektor listrik, gas dan air bersih. Nilai DLQ terendah dimiliki sektor pertambangan dan galian sebesar 0,0206.

Sektor pertanian mempunyai nilai DLQ sebesar 0,0364 yang berarti sektor ini pada masa yang akan datang menjadi sektor non basis. Kedudukan sektor pertanian yang menjadi sektor non basis terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo di masa yang akan datang karena kurang didukung oleh masyarakat dalam pemberdayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh pemerintah seperti kurang antusiasnya masyarakat terhadap program-program penyuluhan pertanian, tidak patuhnya sebagian petani dalam penentuan masa tanam dimana kebanyakan mereka kurang mengindahkan peringatan pemerintah ketika akan ada pengeringan DAM Colo sehingga banyak petani yang terancam gagal panen karena kekurangan air.

Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor ekonomi yang diperkirakan akan menjadi sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo pada masa yang akan datang dengan nilai DLQ untuk sektor pertambangan dan galian sebesar 0,0206. Usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar merupakan jenis pertambangan rakyat dengan skala usaha yang kecil dan penguasaan teknologi yang sederhana. Sehingga hasil produksi dari sektor ini pun terbatas dan diperkirakan tidak akan mampu untuk mengekspor sampai keluar wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk masa yang akan datang.

Sektor industri pengolahan mempunyai nilai DLQ sebesar 0,0279 yang merupakan nilai DLQ terendah nomor dua dibandingkan nilai DLQ sektor ekonomi lainnya yang merupakan sektor non basis di masa yang akan datang. Hal ini karena sektor industri pengolahan laju pertumbuhannya rendah.

Sektor listrik, gas dan air bersih berdasarkan analisis DLQ ternyata dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo

untuk masa yang akan datang dengan nilai DLQ sebesar 1,6629. Hal ini mengingat listrik, gas dan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat kebutuhan akan listrik dan air bersih juga terus meningkat karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor ekonomi yang tidak mengalami perubahan posisi yaitu tetap menjadi sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian merupakan dua sektor ekonomi yang mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis pada masa yang akan datang. Sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa merupakan sektor ekonomi yang tidak mengalami perubahan posisi yaitu tetap menjadi sektor non basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo baik untuk masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.

Kebutuhan ini selain untuk kebutuhan penerangan juga untuk memenuhi kebutuhan industri, meskipun pelanggan dari rumah tangga tetap mendominasi pelanggan listrik ini. Seperti halnya listrik, kebutuhan akan air bersih juga merupakan kebutuhan yang dirasakan mutlak untuk dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih demi hidup yang sehat. Sehingga kebutuhan akan air bersih juga dirasakan meningkat yang menuntut adanya kontinuitas dan pemenuhan kualitas di dalam penyediaannya.

Seperti halnya sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga tidak mengalami perubahan posisi bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo yaitu tetap sebagai sektor basis. Hal ini terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo yang menetapkan pusat-pusat pertumbuhan daerah yang dibagi menjadi satuan wilayah pengembangan. Salah satu fungsi wilayah sebagai satuan wilayah pengembangan adalah sebagai pusat perdagangan, yang merupakan daerah penyangga kebutuhan bagi kota Surakarta sebagaimana yang telah dikembangkan di daerah Kartasura dan Solo Baru.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tetap menjadi sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Kondisi tersebut tidak lain karena didukung oleh keberadaan beberapa lembaga keuangan seperti bank, koperasi,

pegadaian dan asuransi serta adanya sewa bangunan. Ada dua jenis bank di Kabupaten Sukoharjo yaitu Bank Rakyat Indonesia dan bank umum lainnya selain Bank Rakyat Indonesia. Bank umum lain selain Bank Rakyat Indonesia sendiri terdiri dari BUMD/BUMN, bank swasta, BPR/BKK, Bank Pasar dan BKD. Sedangkan untuk koperasi di Kabupaten Sukoharjo ada dua jenis juga yaitu koperasi KUD dengan koperasi non KUD. Lembaga-lembaga keuangan yang ada tersebut dapat memberikan pinjaman modal terutama bagi pengusaha kecil, industri rumah tangga dan petani.

Sektor pengangkutan dan komunikasi tidak mengalami perubahan posisi yaitu tetap menjadi sektor non basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut berkaitan dengan semakin baru dimulainya peningkatan kualitas fisik prasarana perhubungan darat seperti jalan raya dan jembatan khususnya untuk jalan di tingkat pedesaan. Program-program pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana perhubungan tersebut antara lain Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Padat Karya Produktif Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Padat Karya Produktif Anggaran Biaya Tambahan (ABT) mempunyai prioritas penggunaan dana diantaranya untuk pengerasan jalan protokol desa, rehabilitasi jembatan dan gorong-gorong dengan memberdayakan sumber daya yang ada di wilayah yang bersangkutan belum terlaksana secara optimal dan menjangkau wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil.

Sedangkan di bidang komunikasi dan media massa, sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Sukoharjo antara lain berupa radio, televisi, telepon, jaringan internet dan surat kabar. Media komunikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi. Meluasnya jaringan telepon baik kabel ataupun nirkabel dengan pemasangan beberapa *tower* pemancarnya belum mampu mendukung posisi sektor ini sebagai sektor basis terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

Seperti halnya sektor ekonomi sebelumnya, sektor jasa-jasa juga belum dapat menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo baik untuk saat ini ataupun mendatang. Faktor yang kurang mendukung posisi dari sektor jasa-jasa di Kabupaten Sukoharjo ini antara lain jasa pendidikan seperti keberadaan beberapa

sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta yang masih terbatas. Di samping hal itu, sektor jasa di Kabupaten Sukoharjo juga adanya potensi objek wisata yang berada di wilayah ini yang belum dikerjakan secara optimal.

Beberapa objek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan antara lain :

1. Wisata danau air tawar yaitu waduk Mulur dan DAM Colo
2. Wisata tradisional ke Keraton Kartasura
3. Wisata alam, meliputi :
 - a. Pemandian Batu Seribu
 - b. Hutan Mojolaban

Keberadaan objek-objek wisata ini akan mendukung posisi sektor jasa apabila dikembangkan agar menjadi sektor basis di masa yang akan datang melalui pemasukan daerah yang berasal dari pengeluaran wisatawan baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Posisi sektor pertanian yang menjadi non basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo turut mempengaruhi posisi sektor industri pengolahan di masa yang akan datang menjadi sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Hal ini mengingat sektor pertanian merupakan sektor utama penyedia bahan baku sektor industri pengolahan di wilayah ini terutama untuk jenis industri pengolahan makanan ataupun industri kerajinan tangan yang mempunyai bahan baku dari alam, dimana kebanyakan industri pengolahan tersebut masih berskala industri kecil dan industri rumah tangga. Di samping itu posisi sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sektor non basis belum mendukung posisi sektor industri pengolahan untuk menjadi sektor basis di masa mendatang..

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Sukoharjo pada masa yang akan datang dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis bagi perekonomian di wilayah ini. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai nilai DLQ lebih besar dari satu sehingga berarti sektor ini dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo pada masa mendatang.

b. Sektor Pertanian

Hasil analisis *Dynamic Location Quotient* terhadap lima sub sektor yang terdapat dalam sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Nilai DLQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo

No	Sub sektor	DLQ	Keterangan
1	Tanaman bahan makanan	0,0796	Non Basis
2	Tanaman perkebunan rakyat	-0,4048	Non Basis
3	Peternakan	0,0882	Non Basis
4	Kehutanan	0,0001	Non Basis
5	Perikanan	-0,0189	Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 16

Hasil analisis DLQ untuk kelima sub sektor dalam sektor pertanian menghasilkan kelima sub sektor mempunyai nilai DLQ lebih kecil dari satu. Sehingga kelima sub sektor pertanian tersebut pada masa yang akan datang menjadi non basis. Sehingga diperlukan langkah antisipasi terhadap program-program pemerintah agar mampu meningkatkan kondisi pada tiap sub sektor pertanian.

Diantara penyebab terjadinya hal ini adalah banyaknya masyarakat yang mulai meninggalkan pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian dan beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Hal ini seiring dengan semakin menjamurnya ruko-ruko perdagangan yang letaknya strategis dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo seperti yang berada di Solo Baru. Selain itu, seiring dengan seringnya pemerintah mengeringkan Sungai Bengawan Solo guna perbaikan pembangunan sehingga banyak sawah yang dibiarkan kering atau tidak dikerjakan selama masa pengeringan sehingga memicu masyarakat untuk beralih ke pekerjaan lain yang mampu menghasilkan pendapatan guna menopang kebutuhan rumah tangga.

Meskipun pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan pola asuh dalam pembimbingan pengolahan lahan dengan diintensifkan peran para penyuluh pertanian namun masih banyak kendala-kendala yang harus dihadapi seperti semakin sempitnya lahan dan kepemilikan lahan karena adanya alih fungsi lahan subur-subur menjadi perumahan, gedung dan bangunan lainnya. Disamping itu, tingkat gangguan hama dan penyakit yang menyerang tanaman teruma tanaman bahan pangan.

C. Analisis Gabungan *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient*

a. Sektor Perekonomian

Dalam rangka mengetahui perubahan posisi dari tiap-tiap sektor perekonomian yang ada maka dapat dilakukan dengan menggabungkan dua

metode analisis sebelumnya yaitu metode *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient*. Hasil gabungan analisis *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient* terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo dapat disaksikan dalam Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Perubahan Posisi Sektor Perekonomian di Kabupaten Sukoharjo

No	Lapangan Usaha	LQ	DLQ	Keterangan
1	Pertanian	1,0931	0,0364	Basis menjadi Non Basis
2	Pertamb & galian	1,0183	0,0206	Basis menjadi Non Basis
3	Industri penghn	0,8990	0,0279	Tetap Non Basis
4	List, gas & air bsh	1,2614	1,6629	Tetap Basis
5	Bangunan	0,7928	0,8345	Tetap Non Basis
6	Perdag, htl & rest	1,1780	1,5464	Tetap Basis
7	Pengk & kom	0,9948	0,0302	Tetap Non Basis
8	Keu,persew& jasa	1,0525	1,5368	Tetap Basis
9	Jasa-jasa	0,9388	0,4452	Tetap Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 17

Berdasarkan data pada Tabel 16 diketahui terdapat tujuh sektor yang tidak mengalami perubahan posisi yaitu tiga sektor tetap menjadi sektor basis dan empat sektor yang tetap menjadi sektor non basis. Ketiga sektor ekonomi tersebut antara lain sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang tetap menjadi basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo baik untuk saat ini ataupun pada masa yang akan datang, sedangkan empat sektor yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa tetap menjadi sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo baik untuk saat ini ataupun di masa mendatang.

Ada dua sektor yang mengalami perubahan posisi yaitu sektor pertanian dengan sektor pertambangan dan galian. Kedua sektor ini mengalami perubahan posisi dari sektor basis pada saat ini menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang.

Perubahan posisi yang terjadi pada sektor pertanian lebih disebabkan karena banyak beralihnya fungsi lahan dan banyak beralihnya masyarakat ke sektor perdagangan. Dimana pada tahun awal penelitian luas lahan pertanian untuk tanama padi seluas 48.906 ha menjadi 46.440 ha pada tahun akhir

penelitian yaitu tahun 2005. Sedangkan perubahan posisi yang terjadi pada sektor pertambangan dan galian dari sektor basis menjadi sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo diakibatkan karena usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar merupakan jenis pertambangan rakyat dengan skala usaha yang kecil dan penguasaan teknologi yang sederhana. Pertambangan rakyat yang diusahakan meliputi pasir, kerikil, batu kali dan tanah liat.

b. Sektor Pertanian

Untuk mengetahui perubahan posisi dari tiap-tiap sub sektor pertanian maka dapat dilakukan dengan cara menggabungkan dua metode analisis sebelumnya yaitu metode *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient*. Hasil gabungan analisis *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient* terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo dapat disaksikan dalam Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Perubahan Posisi Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo

Sub Sektor	LQ	DLQ	Keterangan
1. Tanaman bahan makanan	1,1276	0,0796	Basis menjadi Non Basis
2. Tanaman perkebunan rakyat	0,3755	-0,4048	Tetap Non Basis
3. Peternakan	1,6607	0,0882	Basis menjadi Non Basis
4. Kehutanan	1,8065	0,0001	Basis menjadi Non Basis
5. Perikanan	0,1208	-0,0189	Tetap Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 18

Berdasarkan penggabungan dua metode analisis sebelumnya yaitu metode analisis LQ dan DLQ diketahui bahwa tiga dari lima sub sektor yang terdapat dalam sektor pertanian mengalami perubahan posisi. Ketiga sub sektor tersebut terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan yang mengalami perubahan posisi dari sub sektor basis pada saat ini menjadi sub sektor non basis pada waktu mendatang serta sub sektor perkebunan rakyat dan sub sektor perikanan yang tidak mengalami perubahan posisi tetap menjadi sub sektor non basis pada saat ini dan pada masa yang akan datang.

Sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan mengalami perubahan posisi dari sub sektor basis di masa

sekarang menjadi sub sektor non basis di masa yang akan datang. Kondisi ini terkait dengan semakin menurunnya animo masyarakat terhadap bidang pertanian. Untuk sub sektor tanaman bahan makanan semakin sedikitnya luas lahan produktif, faktor pengolahan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi alam dan cuaca menjadikan kendala bagi masyarakat yang berkecimpung didalamnya.

Sub sektor peternakan pada masa yang akan mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis disebabkan produktivitas peternakan belum mencukupi untuk kebutuhan lokal dan harga yang harus bersaing dipasar, sehingga memicu masuknya hasil ternak dari Kabupaten lain terutama Kabupaten Boyolali.

Sedangkan pada sub sektor kehutanan terjadi karena semakin menyempitnya kawasan hutan yang ada di Sukoharjo yang tergeser penggunaannya untuk perumahan maupun pembangunan yang lainnya.

Sub sektor tanaman perkebunan rakyat tetap menjadi sub sektor non basis di masa mendatang dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo, bahkan nilai DLQ negatif yaitu sebesar -0,4048 dan -0,0189. Hal tersebut dapat dikarenakan kurang adanya dorongan dari pemerintah kepada masyarakat untuk mengolah lahan perkebunan yang ada dan ketidaksesuaian lahan yang ada dengan tanaman perkebunan yang akan dikembangkan. Untuk sektor perikanan, hal ini banyak terkait dengan minimnya penggunaan lahan untuk tambak, karamba karena ketersediaan air yang terbatas seiring dengan seringnya pengeringan sungai Bengawan Solo yang merupakan sumber pengairan pada lahan garapan.

D. Analisis *Shift Share*

Analisis shift Share ini digunakan untuk mengetahui perubahan posisi sektor pertanian atau sub sektor pertanian yang terdiri dari Structural Shift Share (SSS) dan Locational Shift Share (LSS)

a. Sektor Perekonomian

Berdasarkan nilai *Structural Shift Share*, *Locational Shift Share* dan *Total Shift Share* untuk sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang mengalami perubahan posisi yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan galian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Nilai SSS, LSS dan TSS Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo

No	Sub Sektor	SSS	LSS	TSS
1.	Pertanian	-3,36864	1,306160	-2,06248
2.	Pertambangan & galian	-6,02172	-7,151760	-13,17348
3.	Industri pengolahan	2,13756	-5,086180	-2,94862
4.	Listrik, gas & air bersih	112,87200	-30,408000	82,46400
5.	Bangunan	87,60094	11,937940	99,53888
6.	Perdagangan, hotel & restoran	-3,10416	6,918240	3,81408
7.	Pengangkutan & komunikasi	13,67640	-11,755440	1,92096
8.	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	0,59300	4,530520	5,12352
9.	Jasa-jasa	3,17130	-5,766000	-2,59470

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 15

Berdasarkan metode analisis *Shift Share* dapat diketahui faktor yang menyebabkan perubahan posisi dari masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Perubahan posisi yang terjadi pada sektor pertambangan dan galian disebabkan oleh pengaruh faktor strukturnya, sedangkan perubahan posisi yang terjadi pada sektor pertanian diakibatkan oleh pengaruh faktor lokasinya.

Perubahan posisi yang terjadi pada sektor pertambangan dan galian yaitu dari sektor basis pada masa sekarang diperkirakan menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang terjadi akibat pengaruh dari faktor strukturnya, mengingat struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo cenderung telah beralih dari sektor primer ke sektor lainnya yaitu sektor sekunder atau sektor tersier.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dirasakan belum begitu berpihak terhadap sektor ini. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya penelitian yang serius guna mengetahui seberapa besar dan macam dari deposit bahan tambang yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo ini. Kondisi tersebut menyebabkan banyak barang tambang yang belum dikelola oleh pemerintah kabupaten secara maksimal atau pengembangan potensi dari suatu barang tambang guna meningkatkan pendapatan daerah.

Selain sektor pertambangan dan galian, sektor pertanian juga mengalami perubahan posisi dari basis pada masa sekarang menjadi basis pada masa yang akan

datang karena faktor lokasinya. Sebenarnya lokasi Kabupaten Sukoharjo yang secara geografis mempunyai ketinggian permukaan bumi yang cukup bervariasi, sehingga cukup sesuai untuk tempat tumbuh berbagai jenis tanaman, sesuai dengan ketinggian tanahnya. Macam-macam hasil bumi Kabupaten Sukoharjo ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan. Apalagi didukung dengan kebijakan pemerintah kabupaten untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang antara sektor primer dan sektor sekunder melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan menginventarisasi potensi bahan baku yang dihasilkan yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri, mengembangkan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku industri serta memilih dan menyusun komoditas prioritas per wilayah. Sehingga diharapkan sektor pertanian mampu meningkatkan perannya dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan beberapa macam program dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja serta daya saing produk industri pengolahan dengan sasaran utamanya industri kecil dan industri rumah tangga. Program-program tersebut antara lain dapat berupa program pengembangan teknologi dan manajemen yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas produk serta menerapkan sistem pengendalian mutu dan dampak lingkungan bagi industri kecil dan industri rumah tangga, serta program pengembangan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang meliputi pengusaha, tenaga kerja serta aparat pembina.

Di samping itu adanya program pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan dan nilai tambah serta penetrasi pasar industri kecil dan industri rumah tangga, meningkatkan kerjasama antara industri kecil dan industri rumah tangga dengan petani produsen bahan baku serta pengusaha menengah dan besar, dalam rangka menjamin kepastian pasar dan mutu bagi industri kecil dan industri rumah tangga serta menjamin ketersediaan bahan baku. Adanya program pengembangan informasi industri yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi industri kecil dan industri rumah

tangga sehingga membantu dalam pengembangan usahanya serta informasi bagi pembina sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berhasil dengan lebih baik.

b. Sektor Pertanian

Besarnya nilai *Structural Shift Share*, *Locational Shift Share* dan *Total Shift Share* untuk sub sektor yang terdapat dalam sektor pertanian yang mengalami perubahan posisi, yaitu sub sektor tanaman perkebunan rakyat, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 19. Nilai SSS, LSS dan TSS Sub Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo

No	Sub Sektor	SSS	LSS	TSS
1	Tanaman BM	0,306356	-0,285360	0,020996
2	Tanaman perb	-75,389832	6,536400	-68,853432
3	Peternakan	0,857212	-1,030260	-0,173048
4	Kehutanan	-21,499632	69,186040	47,686408
5	Perikanan	-30,466936	-9,226640	-39,693576

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 16

Berdasarkan nilai SSS, LSS dan TSS dalam sektor pertanian diketahui faktor yang menentukan perubahan posisi masing-masing sub sektor tersebut. Sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan mempunyai nilai SSS lebih besar dibanding nilai LSS sehingga perubahan posisi yang terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan disebabkan oleh faktor struktur ekonominya. Kebijakan pemerintah daerah yang dirasakan lebih memihak kepada sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan mengingat keduanya merupakan sub sektor penyangga makanan pokok penduduk di wilayah ini. Kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah pengaturan dan perbaikan secara berkala sistim irigasi yang menggunakan DAM Colo, Penyuluhan Pertanian pada tiap-tiap Kecamatan, Kemudahan izin pendirian peternakan di lahan non pemukiman. Kebijakan-kebijakan ini membawa dampak yang baik terhadap sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan namun belum memberikan hasil yang optimal. Sektor tanaman bahan makanan juga mempunyai kelemahan dalam pengusahaannya yaitu belum diusahakan secara komprehensif yang mencakup berbagai bidang. Belum adanya kemitraan dengan pengusaha dalam pengadaan bibit bermutu, teknologi budidaya, teknologi pengolahan hasil

dan pemasaran turut serta melemahkan sektor ini yang menyebabkan sektor ini tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Kelemahan sektor peternakan juga belum adanya pencegahan terhadap penyebaran bibit penyakit seperti flu burung secara berkala dan intensif menjadikan sub sektor ini tidak mampu menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan sub sektor penyedia bahan makanan pokok dan penyedia bahan makanan sehari-hari bagi masyarakat. Produk yang dihasilkan oleh sub sektor ini antara lain padi, palawija dan buah-buahan. Padi merupakan komoditi utama sub sektor tanaman bahan makanan, mengingat komoditi ini merupakan sumber makanan pokok bagi masyarakat. Padi menempati urutan pertama di antara produk sub sektor tanaman bahan makanan lainnya baik dari segi produksi ataupun penggunaan lahannya. Lahan di Kabupaten Sukoharjo yang dimanfaatkan untuk pembudidayaan tanaman padi seluas \pm 21.178 ha. Produksi padi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 mencapai 64,43 Kw/Ha naik 1,18 % dibandingkan pada tahun 2004. Selain padi, komoditas tanaman bahan makanan yang lain yaitu jagung dengan lahan seluas 5.336 ha mampu mencapai produksi sebesar 28.042 ton, meningkat tajam dibandingkan tahun 2004 yang mempunyai nilai produksi sebesar 15.569 ton. Ketela pohon merupakan komoditas tanaman bahan makanan yang mencapai nilai produksi pada tahun 2005 sebesar 106.283 ton meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mempunyai nilai produksi sebesar 105.179 ton dengan lahan seluas 5.489 ha, dimana sentra produksi jagung dan ketela pohon terletak di Kecamatan Polokarto.

Sedangkan untuk sub sektor kehutanan mempunyai nilai SSS lebih kecil daripada nilai LSS sehingga faktor yang menentukan terjadinya perubahan posisi pada sub sektor tersebut yaitu faktor lokasinya.

Sub sektor tanaman perkebunan rakyat tidak mengalami perubahan posisi tetap sub sektor non basis pada masa yang akan datang. Kebijakan pemerintah daerah yang dirasakan lebih memihak kepada sub sektor tanaman bahan makanan dan kelemahan dalam hal pengusahannya yaitu belum diusahakan secara intensif dan dengan skala yang kecil, serta belum adanya kemitraan dengan pengusaha dalam pengadaan bibit yang bermutu, teknologi budidaya, teknologi pengolahan

hasil dan pemasaran hasil turut serta melemahkan sektor ini yang menyebabkan sektor ini tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

Berbeda dengan sub sektor tanaman perkebunan rakyat, sub sektor peternakan mengalami perubahan posisi dari sub sektor basis pada masa sekarang menjadi sub sektor non basis pada masa yang akan datang yang dipengaruhi oleh faktor strukturnya. Program peningkatan ketrampilan peternak dan penggunaan teknologi baru dilakukan dengan cara penerapan penggunaan teknologi pakan dan pengembangan hijauan kualitas unggulan serta pengembangan teknologi pengolahan limbah dan hasil ternak. Selain itu adanya program pengembangan usaha peternakan yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga pemberian kredit yang lain belum mampu mengangkat sub sektor ini menjadi basis pada masa yang akan datang.

Perubahan posisi pada sektor kehutanan juga ditentukan oleh faktor lokasinya. Sebenarnya kondisi geografis Kabupaten Sukoharjo cocok untuk pengembangan sub sektor ini, terutama wilayah Kabupaten Sukoharjo bagian Selatan dan Timur merupakan tempat yang cukup potensial untuk kegiatan kehutanan. Namun pada kenyataannya sub sektor kehutanan tidak dapat diharapkan untuk menjadi sub sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara jenis tanah dengan jenis tanaman hutan yang ada atau masih kurangnya upaya peremajaan pada lahan-lahan hutan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika produktivitas sub sektor kehutanan mengalami penurunan pada tahun-tahun mendatang. Di samping itu lahan-lahan kehutanan yang mempunyai potensi wisata belum mendapatkan sentuhan pengembangan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi sumber daya hutan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menjadi pendorong bagi pengembangan sektor lain. Adanya penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di sekitar hutan yang mengakibatkan hutan gundul dan meluasnya lahan kritis sehingga produksi hutan di Kabupaten Sukoharjo semakin menurun.

Seperti halnya sektor tanaman perkebunan dan peternakan, sub sektor perikanan posisi tetap menjadi sub sektor non basis perekonomian Kabupaten

Sukoharjo di masa mendatang dengan faktor penentu berupa faktor lokasinya. Dari sub sektor perikanan ini, sebenarnya Kabupaten Sukoharjo mempunyai potensi terutama di bidang perikanan darat terutama di Kecamatan Nguter dan Bendosari karena pada kedua wilayah tersebut terdapat waduk. Di Kecamatan Nguter terdapat DAM Colo dan di Kecamatan Bendosari terdapat Waduk Mulur. Dimana apabila pemerintah yang didukung masyarakat sekitar lokasi bersungguh-sungguh mengembangkan sub sektor perikanan akan lebih mudah mengingat ketersediaan air yang lebih mudah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo selama tahun penelitian (2001-2005) yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
2. Sub sektor pertanian yang menjadi sub sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo selama tahun penelitian (2001-2005) yaitu sub sektor Stanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan.
3. Sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang mengalami perubahan posisi di masa yang akan datang yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan galian. Kedua sektor ini mengalami perubahan posisi dari sektor basis menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang.
4. Sub sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo yang mengalami perubahan posisi di masa yang akan datang yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan. Ketiga sub sektor ini mengalami perubahan posisi dari sektor basis menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang.
5. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi pada sektor pertanian dan sub sektor kehutanan adalah faktor lokasinya. Sedangkan perubahan posisi pada sektor pertambangan dan galian, sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan adalah faktor strukturnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Sektor pertanian dan sektor pertambangan dan galian mengalami perubahan posisi dari sektor basis menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan perhatian terhadap kedua sektor ini yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian guna mengetahui factor-faktor yang menyebabkan kemunduran sektor pertanian dan meneliti seberapa besar dan macam dari deposit bahan tambang yang dimiliki oleh

Kabupaten Sukoharjo. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan penertiban pelaksanaan usaha pertambangan dan penggalian yang telah ada melalui pemetaan ulang dengan tujuan untuk menata kembali wilayah-wilayah eksploitasi sumber daya tambang agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. *Propenas 2000-2004 : UU No. 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arsyad, L. 1992. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-2*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- , 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-4*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- , 2001. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-4*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Baharsyah, S. (1993). *Pokok-Pokok Pemikiran Repelita VI Pertanian* Pengarahan Menteri Muda Pertanian pada Rapat Kerja Nasional Departemen Pertanian. Tanggal 15-17 Februari. 1993. Departemen Pertanian: 23 pp.
- BAPPEDA. 2001. *Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005*. BAPPEDA. Sukoharjo.
- BPS. 2003. *Sukoharjo Dalam Angka 2003 (Sukoharjo In Figures 2003)*. BPS Kabupaten Sukoharjo.
- , 2005. *Sukoharjo Dalam Angka 2005 (Sukoharjo In Figures 2005)*. BPS Kabupaten Sukoharjo.
- BPS. 2005. *Jawa Tengah Dalam Angka 2005 (Jawa Tengah In Figures 2005)*. BPS Propinsi Jawa Tengah.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- , 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Chambali. 2004. *Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Wonogiri dengan Pendekatan Analisis Location Quotient dan Shift Share*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Fatimah, S.N., dan Haris, 2002. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 3 No. 1. 200*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Florida State University. 2002. Location Quotient Technique.
[Http://garnet.acns.fsu.edu/~tchapin/urp_5261/topics/econbase/lq.htm](http://garnet.acns.fsu.edu/~tchapin/urp_5261/topics/econbase/lq.htm).

- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional Bagian Satu dan Dua* (terjemahan Paul Sitohang). Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Harahap, S.S. 2002. Akuntansi, Otonomi Daerah dan Globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. X(2) 2002*. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Hastuti, A. 2002. *Analisis Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. FP Universitas Sebelas Maret. Surakarta (Tidak dipublikasikan)
- Lipsey, R.G, Paul N. Courant, Douglas D. Puruis dan Peter O. Steiner. 1995. *Pengantar Makroekonomi Jilid Satu Edisi Kesepuluh*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Mantra, I. B. 2003. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi Ketiga*. LP3ES. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi Ketiga*. LP3ES. Jakarta.
- Murni, T. 2005. *Identifikasi Sektor Pertanian Dalam Penentuan Sektor Unggulan Di Kabupaten Pematang*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rahardjo, M.D. 1986. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. UI Press. Jakarta.
- Sartono. 2002. *Analisis Penentuan Prioritas Program Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2001 (Penerapan Model Analytic Hierarchy Process)*. FE Universitas Sebelas Maret. Surakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Sambodo, M.T. 2002. Analisis Sektor Unggulan Propinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. X(2) 2002*. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soedjarwo, (1992). *Presiden Soeharto dan Pembangunan Pertanian*. Departemen Pertanian. Jakarta: Citra Media Persada. 256 pp
- Soekartawi. 1995. *Agribisnis : Teori dan Aplikasinya*. Rajawali. Jakarta.

- Sudarwati, S. 2005. *Analisis Identifikasi Sektor Pertanian Di Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Supranto, J. 2001. *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global*. Salemba Empat. Jakarta.
- Surakhmad, W. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suyatno. 2000. Analisa *Economic Base* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22 / 1999 dan UU No. 5 / 1999. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan I (2) Desember 2000*. FE Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Tarigan, R. 2002. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendekatan Ekonomi dan Ruang*. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Medan.
- Todaro, M.P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Edisi keempat*. Erlangga. Jakarta.
- Triharso. 1993. *Tri Matra Pembangunan Pertanian di Daerah Istimewa Aceh* Laporan perjalanan Dinas Dewan Riset Nasional Kelompok Satu (Kebutuhan Dasar Manusia) ke Daerah Istimewa Aceh.: 5 p.
- Usman, S. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wisnubroto, Siti Laela, Mulyono Niti Sapto. 1989. *Asas-Asas Meteorologi Pertanian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Wuryandari, P. 2003. *Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Propinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2000*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Lampiran 1. Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 Tahun 2001-2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	110,73	119,02	128,38	127,82	134,84
2. Pertambangan & galian	111,54	124,42	144,39	131,45	150,28
3. Industri pengolahan	114,31	133,13	144,75	123,21	142,56
4. Listrik, gas & air bersih	122,75	150,63	190,06	219,47	242,86
5. Bangunan	117,13	137,46	105,21	138,74	161,82
6. Perdagangan, hotel & restoran	118,86	135,59	148,81	119,53	129,70
7. Pengangkutan & komunikasi	121,28	141,11	165,66	151,60	176,08
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	113,58	128,32	144,92	126,09	136,73
9. Jasa-jasa	112,09	125,64	143,30	134,84	145,93

Lampiran 2. Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 Tahun 2001-2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	112,25	121,44	124,51	134,56	100
2. Pertambangan & galian	108,34	114,67	128,83	139,40	100
3. Industri pengolahan	111,00	122,92	135,52	143,51	100
4. Listrik, gas & air bersih	117,26	158,27	204,96	221,75	100
5. Bangunan	112,75	120,88	128,72	146,32	100
6. Perdagangan, hotel & restoran	112,22	121,08	128,89	137,15	100
7. Pengangkutan & komunikasi	112,13	134,93	159,15	168,33	100
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	112,39	127,49	138,65	149,54	100
9. Jasa-jasa	114,80	128,28	134,91	143,80	100

Lampiran 3. PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	780.807,35	839.260,25	905.209,87	968.626,61	1.082.508,15
2. Pertambangan & galian	33.723,37	37.615,59	43.807,25	43.460,67	50.854,47
3. Industri pengolahan	758.624,97	883.526,91	960.635,21	1.431.733,80	1.713.911,86
4. Listrik, gas & air bersih	36.372,66	44.631,08	56.316,70	80.179,14	90.018,06
5. Bangunan	138.112,58	162.094,56	188.551,40	203.970,45	255.152,97
6. Perdagangan, hotel & restoran	569.627,20	649.801,83	713.160,77	1.264.581,03	1.427.177,29
7. Pengangkutan & komunikasi	154.897,72	180.215,96	211.574,66	245.202,41	298.987,16
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	111.792,68	126.299,25	142.645,72	160.191,89	179.676,12
9. Jasa-jasa	294.751,40	330.389,78	376.823,00	408.322,19	447.200,76

Lampiran 4. PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	29.654.854,33	33.668.128,27	33.813.526,67	38.492.121,60	44.806.485,33
2. Pertambangan & galian	1.289.611,24	1.407.809,14	1.688.788,52	1.855.129,61	2.276.913,64
3. Industri pengolahan	41.253.415,88	48.176.165,61	56.032.110,15	63.136.583,39	79.037.442,65
4. Listrik, gas & air bersih	1.023.196,76	1.544.504,66	2.009.245,97	2.361.913,35	2.815.653,83
5. Bangunan	6.237.929,50	7.393.911,77	8.891.130,37	10.899.131,66	13.517.731,95
6. Perdagangan, hotel & restoran	28.967.529,98	31.830.470,70	35.660.587,41	38.870.547,20	46.694.123,55
7. Pengangkutan & komunikasi	6.253.965,58	7.924.190,26	9.899.168,21	10.959.329,41	13.852.081,07

8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	4.968.064,67	5.767.937,39	6.448.270,23	7.212.976,80	8.339.491,61
9. Jasa-jasa	13.578.990,17	14.255.707,94	17.459.049,51	19.647.530,03	23.095.462,68

Lampiran 5. PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	641.195,48	740.794,68	861.842,50	757.823,02	802.838,94
2. Pertambangan & galian	25.029,98	31.142,75	42.236,04	33.198,58	33.839,31
3. Industri pengolahan	608.294,19	825.083,74	975.392,44	1.162.044,49	1.202.242,45
4. Listrik, gas & air bersih	18.384,02	27.681,71	44.072,93	36.532,38	37.066,23
5. Bangunan	99.969,88	137.693,22	122.589,87	147.012,09	157.679,83
6. Perdagangan, hotel & restoran	522.019,19	679.310,95	818.237,89	1.057.987,10	1.100.398,77
7. Pengangkutan & komunikasi	106.690,12	144.425,55	198.982,07	161.747,80	169.798,34
8. Keuangan, persewaan & jasa Perusahaan	92.864,86	118.530,83	150.251,13	127.049,88	131.413,31
9. Jasa-jasa	226.400,91	284.452,63	370.031,37	302.817,38	306.511,30
Total PDRB	2.380.848,58	2.803.568,89	3.539.563,31	3.786.212,74	3.941.788,47

Lampiran 6. PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	26.417.424,36	27.725.086,08	27.157.595,62	28.606.237,28	29.924.642,25
2. Pertambangan & galian	1.190.371,57	1.227.651,53	1.295.356,44	1.330.759,58	1.454.230,59
3. Industri pengolahan	37.164.561,05	39.193.652,64	41.347.172,12	43.995.611,83	46.105.706,52
4. Listrik, gas & air bersih	872.603,67	975.868,80	980.306,54	1.065.114,58	1.179.891,98
5. Bangunan	5.532.343,12	6.116.817,45	6.907.250,46	7.448.715,40	7.960.948,49
6. Perdagangan, hotel & restoran	25.813.343,84	26.289.742,59	27.666.472,01	28.343.045,24	30.056.962,75
7. Pengangkutan & komunikasi	5.577.204,52	5.872.915,88	6.219.922,79	6.510.447,43	6.988.425,75
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	4.420.388,39	4.524.128,37	4.650.861,80	4.826.541,38	5.067.665,70
9. Jasa-jasa	11.828.159,77	11.112.677,79	12.941.524,67	13.663.399,59	14.312.739,86
Total PDRB	118.816.400,29	123.038.541,13	129.166.426,45	135.789.872,31	143.051.213,88

Lampiran 7. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 (persen)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1. Pertanian	4,95	-2,05	6,23	5,94	3,77
2. Pertambangan & galian	3,13	5,52	-7,73	1,93	0,71
3. Industri pengolahan	5,46	5,49	3,31	3,46	4,43
4. Listrik, gas & air bersih	11,8	0,45	13,84	1,46	6,89
5. Bangunan	10,56	12,92	1,16	7,26	7,98
6. Perdagangan, hotel & restoran	1,85	5,24	4,07	4,01	3,79
7. Pengangkutan & komunikasi	5,30	5,91	4,18	4,98	5,09
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,35	2,80	5,52	3,43	3,53
9. Jasa-jasa	-6,05	16,46	6,18	1,22	4,45
PDRB	4,37	4,90	4,33	4,11	4,43

Lampiran 8. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 (persen)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1. Pertanian	4,95	-2,05	5,33	4,61	3,21
2. Pertambangan & galian	8,18	3,13	5,51	2,73	4,89
3. Industri pengolahan	5,46	5,49	6,41	4,80	5,54
4. Listrik, gas & air bersih	11,83	9,45	8,65	10,78	7,93
5. Bangunan	10,56	12,92	7,84	6,88	9,55
6. Perdagangan, hotel & restoran	1,85	5,24	2,45	6,05	6,29
7. Pengangkutan & komunikasi	5,30	5,91	4,67	7,34	5,81
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,35	2,80	3,78	5,00	3,48
9. Jasa-jasa	-6,05	16,46	5,58	4,75	5,19
PDRB	3,55	4,98	5,13	5,35	4,75

Lampiran 9. Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1. Pertanian	1.211280135	1.172613507	1.158074957	0.950100232	0.973638401	1.093141446
2. Pertambangan & galian	1.049355328	1.113298928	1.189854849	0.894709965	0.844474336	1.018338681
3. Industri pengolahan	0.816825478	0.923872904	0.860862231	0.947274315	0.946314750	0.899029936
4. Listrik, gas & air bersih	1.051400221	1.244891273	1.640627944	1.230110156	1.140077566	1.261421432
5. Bangunan	0.901788353	0.987909081	0.647663558	0.707838268	0.718802472	0.792800346
6. Perdagangan, hotel & restoran	1.009222251	1.133997827	1.079259512	1.338739969	1.328627495	1.177969411
7. Pengangkutan & komunikasi	0.954667742	1.079245361	1.167425114	0.891025049	0.881763906	0.994825434
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	1.048420717	1.149810703	1.178920156	0.944062165	0.941086685	1.052460085
9. Jasa-jasa	0.955224826	1.123365733	1.043405640	0.794848567	0.777180589	0.938805071

Lampiran 10. Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo ADHK 2000 Tahun 2001-2005

Sub sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1. Tanaman Bahan Makanan	110,66	118,93	131,68	128,30	134,90
2. Tanaman Perkebunan Rakyat	116,23	111,86	101,12	118,39	130,74
3. Peternakan	111,42	121,54	120,81	125,38	133,01
4. Kehutanan	104,22	113,55	123,16	139,10	147,44
5. Perikanan	101,14	128,15	143,86	126,84	138,42

Lampiran 11. Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 Tahun 2001-2005

Sub sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1. Tanaman Bahan Makanan	112,65	128,13	128,87	145,54	169,48
2. Tanaman Perkebunan Rakyat	112,61	114,10	121,88	140,35	160,36
3. Peternakan	119,59	154,24	161,21	181,31	208,59
4. Kehutanan	105,13	116,31	70,48	127,02	199,40
5. Perikanan	116,97	119,23	111,32	124,51	134,61

Lampiran 12. PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005

Sub sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1. Tanaman Bahan Makanan	579.734,00	623.071,66	689.841,05	583.483,83	610.846,94
2. Tanaman Perkebunan Rakyat	30.105,68	28.972,81	26.190,41	24.992,77	22.892,55
3. Peternakan	142.581,76	155.523,86	154.595,54	121.006,41	139.535,97
4. Kehutanan	24.071,68	26.225,01	28.446,12	22.495,74	22.819,68
5. Perikanan	4.314,23	5.466,90	6.136,75	5.844,27	6.744,57

Lampiran 13. PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHB (dalam jutaan rupiah) Tahun 2001-2005

Sub sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1. Tanaman Bahan Makanan	20.829.693,82	23.692.565,61	23.828.705,23	26.911.665,34	31.338.315,33
2. Tanaman Perkebunan Rakyat	2.868.006,30	2.905.915,80	3.103.963,38	3.574.524,41	4.083.974,98
3. Peternakan	3.491.437,09	4.503.026,08	4.706.609,07	5.293.327,74	6.089.830,38
4. Kehutanan	612.461,93	677.566,44	410.608,32	739.967,90	1.161.611,43
5. Perikanan	1.853.255,19	1.889.054,34	1.763.640,67	1.972.636,21	2.132.752,62

Lampiran 14. Nilai LQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo

Sub sektor	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1. Tanaman Bahan Makanan	1.088964036	1.162367411	1.262859421	1.065066703	1.058627731	1.127577060
2. Tanaman Perkebunan Rakyat	0.406050853	0.421294156	0.38143449	0.35812437	0.310611257	0.375503025
3. Peternakan	1.675126699	1.750925575	1.813197897	1.484620006	1.579772579	1.660728551
4. Kehutanan	1.489888517	1.610904824	2.893329364	1.812686795	1.225913209	1.806544542
5. Perikanan	0.086224845	0.11410339	0.128346392	0.126279561	0.149286911	0.120848220

Lampiran 15. Nilai DLQ & SSA Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo

Lapangan Usaha	gij	Gij	DLQ	SSS	LSS	TSS
1. Pertanian	2.742	2.792	0.036350288	-3.36864	1.306160	-2.06248
2. Pertambangan & galian	1.116	5.766	0.020555107	-6.02172	-7.151760	-13.17348
3. Industri pengolahan	3.742	5.260	0.027903560	2.13756	-5.086180	-2.94862
4. Listrik, gas & air bersih	11.392	6.452	1.662909286	112.87200	-30.408000	82.46400
5. Bangunan	7.066	8.666	0.834471343	87.60094	11.937940	99.53888

6. Perdagangan, hotel & restoran	5.068	2.924	1.546381244	-3.10416	6.918240	3.81408
7. Pengangkutan & komunikasi	4.888	6.170	0.030249698	13.67640	-11.755440	1.92096
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	5.384	3.154	1.536831969	0.59300	4.530520	5.12352
9. Jasa-jasa	2.846	7.638	0.445241954	3.17130	-5.766000	-2.59470
PDRB	3.918	4.520	0.682321605	23.06185	-3.941613	19.12024

Lampiran 16. Nilai DLQ & SSA Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo

Sub sektor	gij	Gij	DLQ	SSS	LSS	TSS
1. Tanaman Bahan Makanan	3.500	3.098	0.079644093	0.306356	-0.208560	0.020996
2. Tanaman Perkebunan Rakyat	-2.050	1.594	-0.404780262	-75.389832	6.536400	-68.853432
3. Peternakan	3.350	2.576	0.088227660	0.857212	-1.030260	-0.173048
4. Kehutanan	-0.996	8.532	0.000100295	-21.499632	69.186040	47.686408
5. Perikanan	6.766	1.338	-0.018871703	-30.466936	-9.226640	-39.693576

Lampiran 17 Gabungan Nilai LQ dan DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo

Lapangan Usaha	LQ	DLQ	Perubahan Posisi
1. Pertanian	1.093141446	0.036350288	Basis menjadi Non Basis
2. Pertambangan & galian	1.018338681	0.020555107	Basis menjadi Non Basis
3. Industri pengolahan	0.899029936	0.027903560	Tetap Non Basis
4. Listrik, gas & air bersih	1.261421432	1.662909286	Tetap Basis
5. Bangunan	0.792800346	0.834471343	Tetap Non Basis
6. Perdagangan, hotel & restoran	1.177969411	1.546381244	Tetap Basis
7. Pengangkutan & komunikasi	0.994825434	0.030249698	Tetap Non Basis
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	1.052460085	1.536831969	Tetap Basis
9. Jasa-jasa	0.938805071	0.445241954	Tetap Non Basis

Lampiran 18. Gabungan LQ dan DLQ Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo

Sub Sektor	LQ	DLQ	Perubahan Posisi
1. Tanaman Bahan Makanan	1.127577060	0.079644093	Basis menjadi Non Basis
2. Tanaman Perkebunan Rakyat	0.375503025	-0.404780262	Tetap Non Basis
3. Peternakan	1.660728551	0.088227660	Basis menjadi Non Basis
4. Kehutanan	1.806544542	0.000100295	Basis menjadi Non Basis
5. Perikanan	0.120848220	-0.018871703	Tetap Non Basis

Lampiran 19. PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004-2005

Uraian	2004	2005
ADHB		
1. PDRB (dalam jutaan rupiah)	4.806.448,19	5.545.486,85
2. Penduduk pertengahan tahun	811.910	818.132
3. PDRB per kapita (dalam rupiah)	5.919.927,32	6.778.229,97
ADHK 2005		
1. PDRB (dalam jutaan rupiah)	3.786.212,74	3.941.788,47
2. Penduduk pertengahan tahun	811.910	818.132
3. PDRB per kapita (dalam rupiah)	4.663.340,44	4.818.034,83